

**ISU “JEBAKAN UTANG” DALAM PEMBIAYAAN PROYEK-
PROYEK *BELT AND ROAD INITIATIVE* (BRI) CINA DI
INDONESIA: SEBUAH KAJIAN TERBUKA TENTANG
KOMPLEKSITAS DAN TANTANGAN**



UNIVERSITAS GADJAH MADA

**Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar
dalam bidang Pembangunan Internasional di Asia Timur
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Gadjah Mada**

**Disampaikan pada Pengukuhan Guru Besar
Universitas Gadjah Mada
Tanggal 24 Juli 2025**

**Oleh:
Prof. Dr. Nur Rachmat Yuliantoro**

Bismillaahirrahmaanirrahim

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Yang saya hormati,

Ketua, Sekretaris, dan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada;

Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Akademik Universitas Gadjah Mada;

Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada;

Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada;

Dekan dan para Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;

Rekan-rekan dosen, mahasiswa, segenap sivitas akademika Universitas Gadjah Mada;

para tamu undangan, dan keluarga yang saya cintai,

Alhamdulillah rabb al-'aalamiin. Segala puji bagi Allah Swt, yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, serta memungkinkan kita semua untuk hadir di tempat yang agung ini, Balai Senat Universitas Gadjah Mada. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas diri junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan sekalian umatnya hingga akhir jaman.

Pada hari ini, saya insyaallah akan menyampaikan pidato pengukuhan Guru Besar dalam bidang pembangunan internasional di Asia Timur, di Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Pidato ini saya beri judul ***Isu “Jebakan Utang” dalam Pembiayaan Proyek-Proyek Belt and Road Initiative (BRI) Cina di Indonesia: Sebuah Kajian Terbuka tentang Kompleksitas dan Tantangan***. Melalui pidato ini, saya ingin mendiskusikan sebuah aspek tertentu dari pembangunan internasional, khususnya dalam konteks BRI, yaitu soal pinjaman atau utang luar negeri, yang sering kali menjadi bahan perdebatan dan secara langsung berimplikasi besar bagi hubungan antara Indonesia dan Cina. Topik ini merupakan refleksi dari pengajaran saya di kelas-kelas Politik, Masyarakat, dan Hubungan Internasional Cina Kontemporer; Etika dan Pembangunan; Studi

Pembangunan Internasional; serta berbagai diskusi dan penelitian tentang BRI yang saya ikuti dan kerjakan.

Melalui pidato ini, saya berharap kita akan dapat mengetahui seberapa besar *magnitude* utang luar negeri dalam persoalan pembiayaan proyek-proyek BRI di Indonesia sehingga banyak pihak memberi peringatan bahwa isu ini dapat berkembang menjadi sebuah “jebakan utang.” Berbagai publikasi dan diskusi mengemukakan kekhawatiran tentang dampak utang luar negeri dari Cina yang berpotensi membebani pemerintah dan rakyat Indonesia. Mengingat kompleksitasnya, pemahaman mendalam terhadap fenomena ini masih membutuhkan kajian yang terbuka dan hati-hati. Salah satu istilah yang menarik untuk dibahas dalam konteks ini adalah “simpul Gordian,” merujuk pada masalah rumit yang sulit dipecahkan dengan cara konvensional, sehingga memberikan kerangka pemikiran baru dalam menelaah isu utang dalam pembiayaan proyek BRI. Utang luar negeri Indonesia kepada Cina dapat dibaca sebagai sebuah “simpul Gordian,” yang mencerminkan keterikatan kompleks antara ketergantungan ekonomi, tantangan kedaulatan wilayah, dan kepentingan politik elite domestik. Dalam konteks ini, Indonesia menghadapi tidak hanya persoalan finansial untuk membiayai pembangunannya, tetapi juga tantangan besar bagi politik dan keamanan nasional, sehingga kita perlu memahami secara komprehensif dinamika hubungan bilateral dan urgensi kehati-hatian dalam kebijakan luar negeri yang harus diambil. Isu ini sangat penting untuk dibahas agar publik dan pengambil kebijakan menyadari bahwa utang kepada Cina hadir dengan risiko yang serius.

Pidato ini bertujuan untuk menyajikan sebuah telaah terbuka mengenai isu “jebakan utang” dalam konteks proyek BRI di Indonesia dengan berbagai tantangan dan kompleksitasnya. “Simpul Gordian” menjadi salah satu bagian inti pembahasan karena ia menggambarkan bagaimana tantangan-tantangan dari persoalan utang ini tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan yang sederhana atau sepihak. Dengan pendekatan yang lebih luas, kita dapat melibatkan diri dalam diskusi ilmiah dan objektif sehingga dapat menghindari kesimpulan yang terburu-buru. Sejalan dengan itu, dalam pidato ini juga akan disampaikan beberapa strategi yang kiranya dapat membantu

mengurangi *magnitude* persoalan agar Indonesia dapat membangun dengan lebih leluasa tanpa dibayang-bayangi utang yang besar, dan pada saat yang sama mengembangkan hubungan yang baik dengan Cina, khususnya di bidang ekonomi.

Hadirin yang saya hormati,

Pada dasarnya, pembangunan internasional bertujuan untuk membuat kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat di negara-negara berkembang melalui berbagai strategi, kebijakan, dan program yang mendorong pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan kelestarian lingkungan (Mosse, 2013; Stewart, 2021). Telah menjadi kata yang jamak ditemui dalam kehidupan sehari-hari, istilah “pembangunan” dapat dimaknai secara beragam. Untuk waktu yang sangat lama, misalnya, pembangunan dilihat melalui perspektif modernisasi Barat sebagai standar pertumbuhan dan jalan universal untuk diikuti oleh negara-negara lain. Pandangan ini dikritik keras mengingat setiap negara memiliki sejarah, kehidupan sosial dan budaya, serta struktur politik masing-masing yang menentukan jalur pertumbuhan mereka (Jarso, 2017; Olatunji & Bature, 2019). Meskipun benar bahwa modernisasi dan ekonomi neoliberal masih menjadi konsep yang banyak ditemui dalam pembangunan di berbagai negara dewasa ini, namun penerapannya yang tidak hati-hati telah berimplikasi pada meningkatnya ketimpangan, kerusakan lingkungan, dan hilangnya tradisi lokal, khususnya di negara-negara Selatan, *the Global South*, yang memiliki sejarah dijajah dan dicuri sumber dayanya. Dari sinilah muncul teori pascapembangunan, misalnya, yang mempertanyakan gagasan bahwa hanya terdapat satu cara untuk tumbuh dan menekankan pentingnya memperhatikan berbagai sudut pandang dan tujuan budaya dalam pembangunan (Matthews, 2010). Teori ini menunjukkan betapa pentingnya memasukkan sistem pengetahuan adat, inisiatif lokal, dan pendekatan yang lebih partisipatif dalam membuat rencana pembangunan sehingga pembangunan bisa berhasil dengan efektif dan mencapai tujuan yang ditetapkan.

Di samping perbedaan sudut pandang, pembangunan internasional juga memiliki banyak persoalan dan tantangan. Salah satu masalah terbesar adalah kesenjangan struktural dalam ekonomi

global. Situasi ini membuat negara-negara industri maju mendapatkan keuntungan besar dari proses pembangunan, dan sebaliknya mempersulit negara-negara berkembang untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang mereka (Mensah, 2019). Kesenjangan struktural ini merupakan buah dari kolonialisme, yang masih mewarnai dinamika kekuasaan, hubungan perdagangan, dan arus uang. Sebagai konsekuensinya, hubungan ekonomi antarnegara menjadi tidak seimbang, lebih menguntungkan negara-negara Utara, dan menciptakan rantai ketergantungan ekonomi berbasis pertumbuhan kapital (Abrokwa, 1999). Sejalan dengan itu, pemaksaan model pembangunan tertentu sering kali tidak memenuhi kebutuhan dan prioritas masyarakat setempat sehingga mereka mengalami kerugian. Persoalan ini diperburuk dengan tidak adanya tata kelola yang baik dan lembaga yang kuat di negara-negara berkembang, yang membuka luas pintu untuk korupsi dan krisis sumber daya manusia sehingga sulit untuk melaksanakan rencana dan kebijakan pembangunan (Martin, 2006). Dari sinilah kemudian berkembang gagasan dekolonisasi pembangunan: adalah perlu untuk mempertanyakan dominasi pandangan dan metode Barat, seraya di saat yang sama menerima legitimasi sistem pengetahuan asli serta mengembalikan kebebasan, kedaulatan, dan kemampuan kepada masyarakat untuk membuat keputusan dan bertanggung jawab atas kehidupan mereka sendiri (Thovoethin & Ewalefoh, 2019). Dekolonisasi sekarang telah menjadi salah satu kata kunci utama dalam proses pembangunan internasional di berbagai negara.

Pada alur perspektif yang sejalan dengan dekolonisasi, dunia dewasa ini juga menyaksikan perkembangan pesat kerja sama pembangunan antarnegara berkembang, yang sering kali disebut Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS). Kerja Sama Selatan-Selatan merupakan cara yang berbeda untuk berkolaborasi dan bertumbuh dibandingkan kerja sama tradisional Utara-Selatan. Kerja sama Selatan-Selatan ditunjukkan dengan upaya berbagi sumber daya, teknologi, dan keahlian satu sama lain antara negara-negara berkembang berdasarkan gagasan solidaritas, saling menguntungkan, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Dengan tujuan bersama untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang, Kerja Sama Selatan-Selatan

dibangun atas gagasan saling menghormati dan memiliki, menghargai kedaulatan nasional, kepemilikan lokal, dan kesetaraan (de Oliveira & Leite, 2014). Kerja Sama Selatan-Selatan diharapkan dapat membantu kita mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*, SDGs) lebih cepat dan memberikan hasil yang lebih inklusif dan berkesinambungan.

Terdapat banyak cara untuk mewujudkan Kerja Sama Selatan-Selatan, seperti perdagangan, investasi, pembangunan infrastruktur, bantuan teknis, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia (Soong, 2018). Dalam konteks pembangunan infrastruktur, misalnya, kita harus menyebut Cina, yang telah menjadi sumber utama investasi asing langsung (*foreign direct investment*, FDI) bagi negara-negara berkembang, terutama di Afrika (Lu & Li, 2010). Cina, bersama beberapa negara lain, telah menjadi “donor baru” yang semakin penting dalam memberikan bantuan pembangunan kepada negara-negara Selatan (Kilama, 2015; Esteves & Soares, 2020; Lippolis & Verhoeven, 2022). Para donor baru ini cenderung berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan proyek infrastruktur, termasuk jalan raya, pelabuhan, dan infrastruktur energi, yang berbeda dari para donor tradisional (umumnya negara Barat dan lembaga keuangan internasional) yang sering kali lebih memusatkan perhatian pada tata kelola dan hak asasi manusia. Di Afrika, secara umum Cina dianggap sebagai model ekonomi dan mitra pembangunan internasional yang baik. Keterlibatan Cina didasarkan pada pengalaman pembangunannya sendiri dan tujuannya untuk mendorong kolaborasi yang menguntungkan semua pihak (Mbuya & Mphahlele, 2021). Meski demikian, kehadiran Cina sebagai donor tidak sepenuhnya diterima dengan tangan terbuka; banyak juga orang yang khawatir tentang transparansi, akuntabilitas, kondisi kerja yang buruk, kerusakan lingkungan, dan kemungkinan “jebakan utang” (Bräutigam, 2019; Tetteh, 2021; Mlambo, 2022). BRI bahkan dinilai sebagai “kolonialisme [baru] dengan karakteristik Cina” (Kleven, 2019), bertentangan dengan semangat dekolonisasi. Semua isu ini membuat negara-negara penerima bantuan harus sangat berhati-hati dalam hubungan mereka dengan para donor baru agar inisiatif pembangunan yang mereka jalankan sesuai dengan tujuan nasional masing-masing.

Hubungan antara Indonesia dan Cina dalam hal pembiayaan proyek-proyek pembangunan infrastruktur, sebagaimana akan saya sampaikan kemudian, menunjukkan bahwa pembangunan internasional tidak dapat dilepaskan dari kerumitan relasi kekuasaan dan kepentingan politik yang memengaruhi aliran modal, teknologi, dan sumber daya manusia. Utang luar negeri Indonesia kepada Cina menggambarkan bagaimana pembangunan infrastruktur tidak hanya menjadi isu ekonomi, tetapi juga terkait dengan dinamika kedaulatan, keamanan nasional, dan kepentingan elite politik. Pendekatan tradisional pembangunan yang mengedepankan aspek teknokratis harus juga memasukkan kekuatan geopolitik dan negosiasi strategi antarnegara, yang menjadikan pembangunan internasional sebuah medan tawar yang kompleks dan penuh dengan kepentingan (Brinkerhoff, 2008). Sejalan dengan itu, diperlukan sebuah perspektif multidimensi yang memadukan ekonomi politik, hubungan internasional, dan teori-teori pembangunan agar praktik pembangunan bisa lebih responsif terhadap berbagai tantangan kontemporer (Matthews, 2010).

Hadirin yang saya muliakan,

Pembangunan internasional merupakan salah satu ide yang mendeskripsikan dinamika perkembangan banyak kawasan dunia dewasa ini, termasuk Asia Timur. Asia Timur merupakan sebuah kawasan yang telah mengalami perubahan besar selama beberapa dekade terakhir. Dalam konteks ekonomi, Asia Timur dikenal luas sebagai salah satu kawasan paling dinamis dan terintegrasi di dunia (Dent, 2016). Pencapaian ini dimungkinkan melalui berbagai proses industrialisasi yang cepat, beragam inovasi teknologi, serta perluasan jaringan perdagangan dan investasi. Dewasa ini, Asia Timur dikenal luas sebagai pusat manufaktur dunia yang didukung oleh pengembangan ekonomi digital serta jaringan kerja sama yang memfasilitasi aliran barang, jasa, modal, dan teknologi melintasi batas-batas negara (Sally, 2013). Lintasan pembangunan di kawasan ini tidak hanya mengubah peta kekuatan ekonomi global, tetapi juga mendorong kerangka kerja baru untuk kerja sama dan persaingan antarnegara. Negara-negara di Asia Timur semakin menyadari pentingnya integrasi regional sebagai sarana untuk meningkatkan daya

saing, mendorong inovasi, dan mengatasi tantangan- tantangan bersama (Dent, 2017). Keberhasilan yang diperoleh Asia Timur didorong oleh baik hubungan-hubungan bilateral dan regionalisme, misalnya melalui kerangka *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP), maupun strategi-strategi pembangunan internasional seperti *Belt and Road Initiative* (BRI). Dalam konteks ini, BRI merupakan upaya strategis penting yang bertujuan untuk memperdalam konektivitas infrastruktur, meningkatkan arus perdagangan, dan mendorong integrasi ekonomi antara Asia Timur dengan berbagai kawasan lainnya.

Di tengah dinamika pembangunan internasional, pertumbuhan ekonomi, dan integrasi regional di Asia Timur, pada tahun 2013 pemerintah Cina meluncurkan “proyek abad ini” (Hillman, 2020) bernama *One Belt, One Road* (OBOR), *yi dai yi lu*, yang kemudian diubah namanya menjadi *Belt and Road Initiative*. Merupakan strategi utama kerja sama pembangunan internasional di era kepemimpinan Xi Jinping, dalam dokumen-dokumen resmi BRI juga sering disebut sebagai *Silk Road Economic Belt and the 21st century Maritime Silk Road*, atau cukup *the New Silk Road* (Negara & Suryadinata, 2018; Nedopil, 2025). BRI didasarkan pada lima prioritas, yaitu koordinasi kebijakan, fasilitas yang saling terhubung, perdagangan yang tidak teralangi, integrasi finansial, dan ikatan warga lintas negara (Hillman, 2020; Feingold, 2023; Nedopil, 2025). BRI berperan sebagai instrumen utama Cina untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas tidak hanya di Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Asia Tengah, tetapi bahkan hingga Eropa dan Afrika (Skidmore, 2021). Tujuan BRI mencakup pembangunan ekonomi dan pengaruh geopolitik, yang mencerminkan ambisi Cina untuk memainkan peran sentral tidak saja dalam mendorong sebuah paradigma kerja sama pembangunan internasional yang baru—dengan basis infrastruktur dan konektivitas yang kuat, tetapi juga membentuk masa depan tata kelola global dan tatanan regional. Jangkauan yang luas dan sifat proyek BRI yang beragam telah menarik perhatian dan perdebatan yang besar di antara para akademisi, pembuat kebijakan, dan pengamat internasional di berbagai negara.

Melalui berbagai proyek seperti sarana transportasi; pembangunan jalan, bandara, dan pelabuhan; serta pengembangan

energi, BRI menghubungkan kepentingan nasional Cina dengan visi pembangunan kawasan dan kebutuhan konkret negara-negara mitra. Hingga tahun 2023, tercatat sekitar 200-an perjanjian kerja sama dalam konteks BRI telah ditandatangani oleh Cina bersama dengan lebih dari 150 negara dan 30 organisasi internasional. Semua itu melibatkan pembiayaan lebih dari \$1,6 triliun, menjadikan Cina sebagai pemberi pinjaman terbesar di dunia (Feingold, 2023; Horigoshi, et.al. 2022, pp. 3–4). Dalam laporan berjudul *Belt and Road Reboot: Beijing's Bid to De-risk Its Global Infrastructure Initiative*, AidData (lembaga penelitian di bawah William & Mary's Global Research Institute yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data terkait bantuan pembangunan, keuangan, dan investasi global) menyebutkan bahwa sampai dengan tahun 2023 pemerintah Cina telah mengeluarkan anggaran sebesar \$1,3 triliun atau sekitar Rp20.395 triliun untuk membiayai hampir 21 ribu proyek pembangunan internasional di 165 negara berpenghasilan rendah dan menengah, termasuk pembangunan jalan, kereta api, jembatan, dan pelabuhan (Parks, et.al, 2023; Firmansyah, 2023). Dapat dipahami kemudian bagaimana besarnya bantuan pembangunan internasional yang dikucurkan Cina di atas berdampak pada meningkatnya pengaruh negara ini di arena internasional (Cai, 2017).

Hadirin yang saya hormati,

Indonesia menjadi contoh utama bagaimana BRI bersinggungan dengan tren pembangunan internasional di Asia Timur dan sekitarnya. Lokasi Indonesia yang strategis, sumber daya alam yang melimpah, dan pasar domestik yang terus bertumbuh menjadikan negara ini sebagai salah satu mitra utama BRI. Menyusul normalisasi hubungan bilateral antara Indonesia dan Cina pada tahun 1991, hubungan ekonomi telah menjadi salah satu pilar penting penyokong kerja sama. Cina menjadi mitra perdagangan utama Indonesia sejak tahun 2012. Investasi Cina di Indonesia semakin bertambah dan kini berada di posisi nomor dua setelah Singapura (Peterson, 2023). Pada awal Oktober 2013, Presiden Xi berpidato di depan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Menjadi kepala negara asing pertama yang melakukan hal tersebut (Lalisang, 2020, p. 220), Xi menyampaikan idenya tentang “Jalur Sutra

Maritim,” yang kemudian menjadi salah satu komponen utama dari *Belt and Road Initiative*. Ide Jalur Sutra Maritim kemudian dinilai sebagai selaras dengan wacana “Poros Maritim Dunia” yang diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berpidato di *East Asia Summit* pada bulan November 2014. Sejak itulah BRI telah menjadi salah satu isu utama dalam hubungan bilateral Indonesia dan Cina. Pada tanggal 14–15 Mei 2017, Presiden Jokowi menghadiri *Belt and Road Forum* yang pertama di Beijing, yang kemudian diikuti dengan kesepakatan investasi dan pembangunan sejumlah proyek infrastruktur (kereta cepat, pelabuhan, pembangkit listrik, hingga telekomunikasi) yang didanai oleh Cina di Indonesia.¹ Partisipasi Indonesia dalam BRI dipandang sangat strategis oleh Cina (Yuliantoro, 2020). Sebaliknya, melalui BRI Indonesia juga berpeluang meningkatkan posisi geopolitik dan kerja sama ekonominya dengan negara- negara lain (Yee, 2023).

Merujuk AidData, Center for Economic and Law Studies (Celios) melaporkan bahwa terdapat 71 proyek BRI² di Indonesia

¹ Untuk proyek-proyek BRI, terdapat dua macam pembiayaan dari Cina. Satu berupa skema bantuan resmi (*Official Development Assistance*, ODA), satu lagi bantuan dalam bentuk utang atau hibah, tetapi dengan tujuan komersial (*Other Official Flows*, OOF). ODA biasanya dirujuk sebagai “bantuan resmi,” sementara OOF “bantuan dengan mekanisme utang.” Indonesia dinilai sebagai negara yang paling strategis bagi Cina dalam konteks baik ODA maupun OOF (Celios, 2023, p. 26). Bantuan Cina melalui OOF cenderung lebih besar daripada ODA, dan dalam struktur OOF sendiri utang lebih banyak diberikan daripada hibah (Custer, Horigoshi, Boer & Marshall, 2025, p. 24; Horigoshi, et.al., 2022, p. 24).

² Sayangnya, tidak terdapat kriteria yang jelas bagaimana sebuah proyek yang didanai oleh pinjaman atau investasi dari Cina bisa disebut sebagai “proyek BRI.” Menurut John Hillman, banyak proyek pembangunan dengan dana dari Cina yang dimulai sebelum tahun 2013 juga disebut sebagai “proyek BRI” (2020, p. 5). Terdapat juga dua keterangan berikut: “Sementara Cina menganggap semua proyek, termasuk proyek infrastruktur dan interaksi ekonomi sebagai proyek BRI, Indonesia hanya melihat proyek-proyek infrastruktur yang dimulai pada periode Xi Jinping sebagai proyek BRI” (Negara & Suryadinata, 2018, p. 2) dan “Proyek dalam BRI sulit untuk didefinisikan karena tidak ada daftar resmi dari pemerintah Cina, mana yang termasuk dalam kerangka kerja BRI dan mana yang tidak ... Dalam perspektif pemerintah Indonesia, ‘sebuah proyek bukanlah proyek BRI sampai mereka menyebutnya sebagai proyek BRI’.” (Pratiwi, 2020, p. 79)

senilai total \$20,3 miliar (Shofa, 2023). Dari jumlah proyek tersebut, sembilan di antaranya berada dalam kategori proyek yang diliputi skandal, kontroversi, atau pelanggaran yang dituduhkan (Malik, et.al, 2021, p. 66), termasuk proyek yang paling penting bagi Cina, yaitu kereta api cepat Jakarta-Bandung (Lai, 2019). Ditujukan untuk memangkas durasi perjalanan antara Jakarta dan Bandung menjadi sekitar 40 menit, kereta api cepat ini (kemudian diberi nama Whoosh, akronim dari “Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Hebat”) dapat melaju hingga kecepatan 350 km/jam pada jalur sepanjang 142,3 km. Proyek kereta api cepat ini pada awalnya didesain tanpa permintaan jaminan anggaran pemerintah dari pihak Cina. Inilah yang antara lain membuat pemerintah Indonesia memenangkan tawaran Cina daripada Jepang. Jepang menawarkan nilai investasi *government-to-government* sebesar \$6,2 miliar atau sekitar Rp91 triliun, dengan tiga perempat dari dana ini akan dibiayai melalui pinjaman dengan bunga 0,1% per tahun. Sementara itu, perkiraan awal biaya dengan skema *business-to-business* dari pihak Cina adalah Rp5,13 miliar atau Rp76,95 triliun, dengan Rp4,5 miliar di antaranya berasal dari pinjaman untuk diberikan kepada PT Kereta Api Cepat Indonesia-Cina dengan bunga 2% selama 40 tahun (China Power, 2017).

Dalam perkembangannya kemudian, ternyata proyek ini mengalami pembengkakan biaya yang sangat besar. Biaya proyek meroket menjadi \$6,07 miliar atau sekitar Rp91,5 triliun, yang lalu naik lagi hingga \$7,5 miliar atau sekitar Rp114,1 triliun.³ Untuk merespons *cost overrun* ini, pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 93 tahun 2021, disusul oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 tahun 2023 tanggal 11 September 2023,

³ Sebagian besar proyek BRI di Indonesia dibiayai oleh mekanisme yang didukung oleh negara dalam bentuk pinjaman lunak, obligasi, modal ventura, kredit ekspor, dan pinjaman komersial berskala besar dari China Development Bank (CDB), Export-Import Bank of China (China EXIM), serta Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) (Yuliantoro, 2024). Hampir setengah dari pembengkakan biaya terakhir Whoosh sebesar \$1,2 miliar atau setara Rp18,2 triliun ditutup dengan pinjaman tambahan \$560 juta dari CDB dengan bunga 3,4% per tahun. Besarnya bunga ini pada awalnya 6%; negosiasi pemerintah Indonesia untuk menurunkannya menjadi 2% ditolak oleh bank tersebut (Ayu, Alfarizi, Putri & Akbar, 2023).

yang mengizinkan pendanaan kereta cepat ini dengan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Situasi ini tak pelak menimbulkan konsekuensi serius bagi beban utang pemerintah, di mana beban utang terselubung (*contingent liabilities*) seperti penjaminan APBN ini semakin besar. Menurut AidData, pada tahun 2021 pemerintah Indonesia memiliki utang terselubung atau utang tersembunyi kepada Cina sebesar \$17,28 miliar atau setara dengan Rp245 triliun. Utang tersembunyi ini umumnya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau pihak swasta, yang mengandung risiko penjaminan oleh negara melalui APBN (Sasmita, 2023).

Tidak dapat dipungkiri bahwa investasi besar-besaran Cina melalui berbagai proyek BRI telah mendatangkan manfaat bagi perkembangan pembangunan infrastruktur, revitalisasi industri, dan peningkatan konektivitas di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir. Dalam dokumen *China Belt and Road Initiative (BRI) Investment Report 2024*, Christoph Nedopil (2025) menulis bahwa Indonesia menjadi penerima investasi BRI terbesar pada tahun 2024 dengan nilai sekitar \$9,3 miliar. Meski demikian, juga terdapat kekhawatiran yang meluas tentang semakin tingginya ketergantungan ekonomi terhadap Cina (Liu & Lim, 2023) serta potensi-potensi hilangnya lapangan pekerjaan sebagai konsekuensi dari masifnya arus masuk pekerja migran dari Cina, kerusakan lingkungan, berkurangnya dampak *spillover* dari proyek BRI terhadap industri lokal, “jebakan utang,” korupsi,⁴ hingga dampak geopolitik (Negara & Suryadinata, 2019; Rithmire & Li, 2019; Horigoshi, et.al., 2022, p. 16). Proyek Whoosh juga dianggap sebagai representasi yang sangat kentara dari salah urus pemerintah (Rakhmat, 2022). Sejumlah pihak merasa khawatir bahwa pembiayaan proyek-proyek BRI yang sebagian besar berasal dari

⁴ Dalam buku *Odious Debt: loose lending, corruption, and the Third World's environmental legacy*, Patricia Adams (1991) mengenalkan istilah “*odious debt*” (utang yang menjijikkan) untuk menekankan pada sifat utang yang secara sengaja digunakan oleh rezim pemerintah tertentu untuk kepentingan mereka sendiri, misalnya untuk mempertahankan kekuasaan, bukan untuk kepentingan masyarakat luas. Sifat utang semacam ini bersesuaian dengan definisi umum korupsi politik yang banyak ditemukan di negara-negara Dunia Ketiga (sebagaimana jamak dikenal pada masa tersebut).

pinjaman dapat menimbulkan beban utang yang berat bagi Indonesia, bahkan berpotensi menjadi “jebakan utang” (Ghossein, Hoekman & Shingal, 2021). Terdapat dugaan bahwa Beijing sengaja memberikan pinjaman untuk mendapatkan pengelolaan akses aset strategis di masa depan sebagai pengurang utang (*debt-for-equity swap*), yang bisa terjadi jika keuntungan finansial dari proyek tertentu tidak sesuai dengan yang diproyeksikan sebelumnya (Afifah & Badaruddin, 2024).⁵

Hadirin yang saya muliakan,

Apa itu “jebakan utang” Cina? Diperkenalkan oleh seorang akademisi India bernama Brahma Chellaney, istilah “jebakan utang,” bahkan ada pula yang menyebutnya “*rogue aid*” alias “bantuan jahat” (Carmody, 2020), diyakini sebagai sengaja dijalankan oleh Cina untuk menjerat negara-negara berkembang dengan utang besar guna mendapatkan konsesi atas aset-aset mereka dan membuat mereka rentan akan pengaruh Cina (Chellaney, 2017; Tao, 2023). Melalui *Belt and Road Initiative*, Cina disebut sebagai pelaku utama yang memberikan tekanan utang yang menjebak kepada negara-negara berkembang (Singh, 2020). “Jebakan utang” juga muncul dalam sebuah dokumen Departemen Luar Negeri Amerika Serikat terbitan Mei 2018. Rex Tillerson, Menteri Luar Negeri AS 2017-2018, bahkan menyebut Cina sebagai “*predatory lender*,” pemberi pinjaman yang memangsa (Bräutigam, 2019, p. 4), menjadikan narasi “jebakan utang” mendapatkan perhatian yang semakin meluas di negeri adidaya tersebut (Lai, Lin & Sidaway, 2020). Menyusul kemunculan istilah yang penuh dengan nuansa negatif ini, dalam perkembangannya kemudian “jebakan utang” dinilai sebagai tuduhan sengaja untuk tidak saja melemahkan BRI, tetapi juga peran internasional Cina secara lebih luas (Chandran, 2022; Hao, 2021, p. 2609). Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Nian Peng dan Ming Yu Cheng (2024, pp. 1):

⁵ Potensi kurangnya pendapatan pemerintah dari pembelian tiket disebut oleh Siddhartha Nath & Gusti Raganata (2020) sebagai “risiko ekonomi dan kelayakan” dari Whoosh. Selain itu, terdapat “risiko kelembagaan” berupa pembebasan lahan yang lambat serta potensi kerusakan lingkungan karena perubahan penggunaan tanah, eksploitasi sumber air yang berlebihan, dan polusi air, serta “risiko teknis” dalam bentuk kondisi topografis dan geologis lokal yang rumit (pp. 48–50).

The term “debt trap” ... is used to assert China’s deliberate attempt to extend financial support to countries along the BRI, with the intention of increasing the debt burden of these countries for China to achieve its political goals. The implementation of such programs is seen as a move by China to advance its strategic interests, including expanding its diplomatic influence, securing natural resources, promoting the international use of its currency, and gaining a relative advantage over other powers.

Istilah “jebakan utang” ... digunakan untuk menegaskan upaya sengaja Cina untuk memberikan dukungan keuangan kepada negara-negara BRI, dengan tujuan meningkatkan beban utang negara-negara tersebut sehingga Cina dapat mencapai tujuan politiknya. Implementasi program-program [BRI] dipandang sebagai langkah Cina untuk memajukan kepentingan strategisnya, termasuk memperluas pengaruh diplomatik, mengamankan sumber daya alam, mempromosikan penggunaan mata uangnya secara internasional, dan mendapatkan keunggulan relatif dari kekuatan lainnya.

Benarkah situasi yang digambarkan oleh Chellaney sebagai “jebakan utang” Cina benar-benar terjadi? Negara mana saja yang disebut-sebut telah terperangkap dalam “jebakan utang” Cina? Yang paling sering dikutip dalam berbagai tulisan adalah Sri Lanka. Negara ini selama sepuluh tahun terakhir telah menerima begitu banyak bantuan dari Cina untuk pembangunan pelabuhan, bandar udara, kota-pelabuhan, jalan tol, dan pembangkit listrik (Ramadhan, 2020). Pada tahun 2010, sebelum era BRI, pemerintah Sri Lanka menerima pinjaman \$1,5 miliar dari Cina untuk pembangunan Pelabuhan Internasional Hambantota. Ketika pemerintah Sri Lanka tidak bisa mengembalikan pinjaman tersebut, pada tahun 2017 mayoritas saham pelabuhan senilai \$1,12 miliar dijual kepada sebuah perusahaan Cina (Bräutigam, 2019, p. 5), secara efektif mengawali hak kelola pelabuhan selama 99 tahun. Inilah yang dijadikan sebagai bukti utama dari “jebakan utang” Cina. Padahal, inisiatif pembangunan pelabuhan datang dari pemerintah Sri Lanka sendiri (Tao, 2023). Merekalah yang kemudian meminta Cina membiayai pembangunan pelabuhan setelah gagal meyakinkan negara-negara donor lainnya. Juga, salah urusnya

pelabuhan Hambantota dikarenakan pembangunan pelabuhan tersebut lebih didorong oleh intrik politik domestik dan ambisi pribadi Presiden Mahinda Rajapaksa daripada kepentingan rakyat yang lebih luas. Deborah Bräutigam bahkan dengan tegas menyebut Hambantota sebagai sebuah proyek yang *uneconomic* (Carmody, 2020, p. 3). Juga, penyerahan aset pelabuhan kepada Cina merupakan respons pemerintah yang menghadapi krisis ekonomi yang sangat serius, bukan untuk melayani tujuan strategis Cina. Situasi ini bukanlah *debt-for-asset swap*, sehingga narasi “jebakan utang” Cina tidak memiliki dasar yang kuat (Moramudali & Panduwawala, 2024; Rakhmat, 2022).

Dari Afrika, ada Zimbabwe, yang pemerintahnya telah menandatangani kerja sama untuk penggunaan mata uang Renminbi (yuan) dalam transaksi lokal sebagai konsekuensi dari pinjaman untuk membeli persenjataan guna memerangi pemberontak. Juga Uganda, yang disebut tidak mampu mengembalikan pinjaman \$207 juta untuk pengembangan Bandara Internasional Entebbe (Alfarizi, 2023). Selain kedua negara ini, Ethiopia dan Kenya juga sering disebut sebagai bukti dari *predatory lending* yang dilakukan oleh Cina, yang mendatangkan tuduhan neokolonialisme dan “jebakan utang.” Tetapi, menurut David Monyae & Ken Chapotera (2023), tidak ada bukti yang cukup kuat untuk tuduhan-tuduhan tersebut karena Cina justru memberikan kelonggaran berupa restrukturisasi dan pengurangan utang. Kemudian, sebuah studi tentang perbandingan Djibouti, Pakistan, dan Maladewa masa kini dengan krisis di Meksiko pada tahun 1982 menyimpulkan bahwa ketiga negara memiliki strategi yang lebih baik dalam mengatasi besarnya utang kepada Cina sehingga tidak sampai pada titik terperangkap dalam jebakan utang (Liu, 2020).

Di Asia Tenggara, Laos menjadi studi kasus yang menarik. Negara ini berada dalam situasi krisis utang yang berat karena ketidakmampuannya menghadapi *global shocks* dan didorong oleh perencanaan yang buruk, lemahnya lembaga pemerintah, serta investasi yang berlebihan dalam proyek kereta api Laos-Cina dan proyek-proyek pembangkit tenaga air yang dibiayai oleh pinjaman dari Cina. Antara tahun 2010 hingga 2019, setengah dari utang pemerintah Laos berasal dari Cina. Meski demikian, Keith Barney, Roland Rajah & Mariza Cooray (2025) menyimpulkan bahwa hanya terdapat sedikit bukti yang

sahih bahwa Laos terperangkap dalam “jebakan utang” Cina. Benar bahwa negeri ini rentan mengalami gagal bayar utang, namun mereka berargumen bahwa kedua pemerintah tampak sama-sama berusaha menghindari persoalan yang lebih besar dalam hubungan mereka. Juga, studi Michal Himmer & Zdeněk Rod menyimpulkan bahwa diplomasi jebakan utang hanyalah sebuah narasi yang dibangun tanpa dukungan empiris. Mengambil Sri Lanka, Maladewa, Malaysia, Laos, Kenya, dan Djibouti sebagai objek kajian, mereka menemukan bahwa tidak ada kasus jebakan utang yang dapat terdeteksi di keenam negara tersebut (Himmer & Rod, 2023, pp. 15-16).

Negara-negara Barat meyakini bahwa “jebakan utang” memberi Cina keunggulan ekonomi melalui pengambilalihan aset, tetapi sejauh ini tidak ada bukti kuat untuk itu (Hao, 2021). Deborah Bräutigam dan Meg Rithmire (2021) dengan tegas berargumen bahwa narasi “jebakan utang” yang diarahkan terhadap Cina adalah mitos. Dalam studi lainnya, Bräutigam juga menemukan bahwa basis data tentang pinjaman Cina ke negara-negara Afrika tidak menunjukkan tindakan sengaja memerangkap negara-negara dalam utang untuk kepentingan strategis Cina (Bräutigam, 2019, pp. 5-6) Sementara itu, Lee Jones dan Shahar Hameiri (2020) berpandangan bahwa pelaksanaan BRI utamanya lebih mengikuti berbagai pertimbangan ekonomi daripada sebuah rencana geopolitik strategis Cina. Jika terjadi persoalan pada proyek-proyek tertentu BRI, menurut mereka itu bukanlah sesuatu yang disengaja oleh Beijing, melainkan konsekuensi-konsekuensi yang tidak diharapkan. Gagal bayar utang bukanlah “jebakan utang,” mengingat pemerintah dan elite negara-negara penerima pembiayaan proyek BRI juga mempunyai kepentingan tersendiri dan cara mengatur biaya proyek-proyek pembangunan dari Cina dengan segala konsekuensinya. Gagal bayar lebih disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh elite lokal dan tekanan pasar keuangan Barat, bukan strategi yang diatur dengan rapi oleh Cina untuk mendapatkan aset di negara lain. Dalam argumen Lee Jones dan Jinghan Zeng (2019), juga ditegaskan bahwa kegagalan sejumlah proyek BRI tidak bisa dianggap sebagai keberhasilan strategis Cina.

Temuan dari sejumlah studi di atas tentu merupakan kabar gembira bagi Cina. Sejalan dengan itu, Juru Bicara Kementerian Luar

Negeri Cina Wang Wenbin menilai bahwa “*China-made debt-traps*” adalah sebuah jebakan naratif yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu untuk mengganggu dan merusak kerja sama Cina dengan negara-negara berkembang. Wang menyampaikan tiga poin respons Cina terhadap isu jebakan utang. Pertama, jebakan utang bertentangan dengan akal sehat ekonomi. Mengingat utang adalah hal yang wajar untuk membantu proses pembangunan, maka jika kita hanya melihat aspek negatif dari utang, hal itu berarti kita tidak mendapat informasi yang cukup. Kedua, jebakan utang bertentangan dengan fakta. Kenyataannya, Cina telah membantu banyak negara mengatasi persoalan pendanaan, infrastruktur, dan sumber daya manusia serta mengembangkan kapasitas pembangunan mereka. Ketiga, retorika jebakan utang menggambarkan secara keliru kehendak negara-negara berkembang dan hubungan mereka dengan Cina. Cina mengajukan diri sebagai mitra manakala negara-negara Barat serta lembaga keuangan multilateral dan kreditor komersial yang mereka dominasi enggan untuk membantu sepenuhnya pembangunan negara-negara berkembang (Peng & Cheng, 2024, pp. 2-3). Ketua China International Development Cooperation Agency (CIDCA) Luo Zhaohui juga membantah narasi “jebakan utang” Cina. Menurut Luo, BRI telah membantu dengan signifikan pembangunan internasional di berbagai kawasan dunia, termasuk mengatasi akar krisis utang di banyak negara. Yang terakhir ini dibenarkan antara lain oleh laporan dari AidData yang terbit pada Maret 2023 berjudul *China as An International Lender of Last Resort*. Dalam laporan itu disebutkan bahwa Cina berkomitmen merestrukturisasi utang banyak negara berkembang dengan jangka waktu pengembalian yang lebih fleksibel (Horn, Parks, Reinhart & Trebesch, 2023; Saragih, 2023). Sebagai bagian dari upaya merespons narasi “jebakan utang,” pemerintah Cina kemudian juga mengusahakan “BRI yang hijau” dengan lebih berfokus pada proyek-proyek teknologi mutakhir daripada proyek-proyek infrastruktur berskala besar yang merusak lingkungan. Proyek-proyek ini berpotensi dibiayai lebih banyak oleh investasi perusahaan daripada pinjaman pemerintah atau lembaga keuangan negara Cina (Aulia, 2023). Terlepas dari bantahan Cina dan prospek “BRI hijau” yang ramah lingkungan dan lebih berkualitas (Nedopil, 2025; Xiao, Cheng & Wang, 2018), narasi bahwa Cina telah menjebak

banyak negara melalui utang yang besar dan dibungkus dengan dalih bantuan kerja sama pembangunan internasional tidak hilang begitu saja.

Hadirin yang saya hormati,

Perlu digarisbawahi bahwa utang luar negeri bukanlah sesuatu yang aneh dalam konteks pembangunan internasional. Manakala pemerintah sebuah negara memerlukan biaya dalam jumlah besar untuk pembangunan sebuah proyek strategis, tetapi kekuatan finansial negara tidak memungkinkan atau tidak tersedia, adalah hal yang wajar untuk mendapatkan pinjaman dari negara yang lain atau lembaga keuangan internasional. Sepanjang utang itu diperoleh setelah perencanaan yang matang, digunakan dan dipertanggungjawabkan secara transparan, serta sesuai dengan kemampuan negara untuk kelak membayar kembali, maka utang dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan (Hidayat, 2021). Namun, kita diingatkan oleh sebuah logika sederhana oleh Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono: semakin besar utang, semakin besar juga tanggungan kewajiban untuk membayarnya kembali dan semakin sedikit pertumbuhan ekonomi yang bisa dihasilkan. Ketika pemerintah sebuah negara mempunyai sumber pendapatan yang kecil, dan pada saat yang sama ia memiliki kewajiban pembayaran utang dan bunganya yang sangat tinggi, maka besar kemungkinan pembangunan tidak akan menargetkan program atau proyek yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat luas. Dalam kata-kata Wibisono (2023), “Dengan kapasitas fiskal yang rendah, utang telah menjadi beban yang semakin menghimpit.” Dari sini, dapat dipahami bahwa risiko kesulitan membayar utang dapat membebani anggaran pemerintah dan membatasi ruang fiskal untuk prioritas pembangunan lainnya.

Pada periode pertama pemerintahan Jokowi (2014–2019) utang luar negeri Indonesia bertambah rata-rata Rp435 triliun per tahun. Di periode keduanya (2019–2024), khususnya pada saat Indonesia dilanda pandemi COVID-19 selama tahun 2020 hingga 2022, utang melonjak menjadi rata-rata Rp1.065 triliun per tahun. Mengapa pemerintah Indonesia berutang kepada donor luar negeri untuk membiayai proyek-proyek pembangunan nasional? Sederhananya, utang digunakan untuk membiayai pembangunan, pembangunan diharapkan mendorong

kegiatan ekonomi, kegiatan ekonomi kemudian menghasilkan pajak, yang pada gilirannya digunakan untuk kembali membiayai pembangunan. Di tahun 2024, pemerintah Indonesia menargetkan utang baru sebesar Rp648,1 triliun rupiah. Utang baru ini akan digunakan untuk menambal defisit anggaran yang mencapai Rp522,8 triliun atau 2,29% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (Tempo, 2023a). Sementara itu, untuk tahun 2025 beban utang yang harus ditanggung pemerintah Indonesia diperkirakan akan semakin berat. *Kompas* melaporkan pada 15 Mei 2025 bahwa utang luar negeri Indonesia pada kuartal I 2025 mencapai \$430,4 miliar atau sekitar Rp7.117 triliun, dengan asumsi kurs Rp16.500 per dolar Amerika Serikat. Dari angka ini, sebanyak \$206,9 miliar atau sekitar Rp3.421 triliun adalah utang pemerintah, naik sebesar 7,6% *year-on-year*. Sementara itu, utang luar negeri pihak swasta berkontribusi sebesar \$195,5 miliar atau sekitar Rp3.232 triliun, tumbuh sebesar 1,2% *yoy* (Diahwahyuningtyas & Adhi, 2025). Utang Indonesia kepada Cina juga meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian Celios menyebutkan bahwa utang Indonesia ke Cina pada tahun 2012 tercatat di bawah \$10 miliar. Sepuluh tahun kemudian, besarnya utang telah mencapai \$20,225 miliar atau setara dengan Rp315,1 triliun (Primantoro, 2023). Sampai dengan Juni 2024, nilai utang Cina ke Indonesia adalah \$23,06 miliar atau Rp362,04 miliar, naik sebesar 194,88% jika dibandingkan posisi tahun 2014. Cina menjadi kreditor terbesar Indonesia setelah Singapura (\$54,36 miliar atau Rp853,45 miliar) dan Amerika Serikat (\$27,86 miliar atau Rp437,40 miliar) (Alaydrus, 2024).

Apa yang bisa kita pelajari dari data di atas? Jelaslah bahwa kebutuhan pemerintah akan utang, khususnya dari Cina, semakin meningkat dari tahun ke tahun. Wibisono menilai bahwa strategi pemerintah yang difokuskan pada *refinancing*, mendapatkan utang baru untuk membayar pokok dan bunga utang yang jatuh tempo, telah membuat pengelolaan utang menjadi sekedar gali lubang, tutup lubang. Titik utang baru dibuat untuk menutup kewajiban utang lama, tetapi secara agregat jumlah besarnya utang pemerintah sulit untuk turun. Siklus utang, yang jumlahnya cenderung membesar dari waktu ke

waktu, akan terus berulang dan menimbulkan persoalan serius bagi pengelolaan pembangunan negara (Wibisono, 2023).

Hadirin yang saya muliakan,

Apakah dengan ini semua artinya Indonesia sudah terperangkap dalam “jebakan utang” Cina?

Persepsi bahwa Indonesia tergantung secara ekonomi kepada Cina telah dijadikan sebagai alasan bahwa Indonesia berpotensi masuk dalam perangkap “jebakan utang” negeri tersebut. Hal ini setidaknya ditunjukkan oleh 51% dari 1.414 responden survei yang dilakukan oleh Celios (Rakhmat, Purnama & Adhinegara, 2024). Persepsi ketergantungan ekonomi menempatkan pemerintah Indonesia pada tekanan untuk menyelaraskan kerangka hukum dan kebijakan-kebijakan strategisnya dengan kepentingan mitra ekonomi seperti Cina. Dinamika ini menimbulkan kekhawatiran akan tergerusnya kedaulatan ekonomi, terutama di sektor-sektor yang dianggap penting bagi keamanan nasional dan pembangunan jangka panjang. Persepsi ini juga telah memperumit postur diplomatik Indonesia, mengingat prinsip politik luar negeri bebas dan aktif mendorong pemerintah untuk menjaga kesetimbangan hubungan dengan tidak saja Cina, tetapi juga dengan kekuatan-kekuatan global lainnya, terutama Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa.

Dalam perspektif ekonomi, misalnya, Muhammad Zulfikar Rahmat berargumen bahwa pembebanan skema pinjaman yang tinggi merupakan salah satu indikasi Indonesia telah masuk dalam “jebakan utang” Cina (Firmansyah, 2023). Indikasi-indikasi lain berupa keyakinan semu bahwa utang berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi hingga muncul ketergantungan yang tidak mudah dihilangkan, serta kelemahan sistem politik yang membuat negara penerima pinjaman merasa lebih membutuhkan negara pemberi pinjaman daripada sebaliknya (Primantoro, 2023). Yang menarik, Rakhmat dan Yeta Purnama berpendapat bahwa pemahaman kita tentang perangkap jebakan utang seharusnya diperluas juga dengan pertimbangan non-ekonomi. Mereka menilai bahwa jebakan utang terjadi ketika sebuah negara tidak dapat memutuskan kebijakan tertentu, misalnya politik luar

negeri dan keamanan, secara bebas karena tidak ingin menyinggung perasaan mitranya. Dalam konteks Indonesia dan Cina, mereka menyebut beberapa contoh ketidakmampuan menentukan kebijakan secara bebas tersebut: (1) sikap pemerintah Prabowo terhadap isu Laut Natuna Utara, (2) cenderung diamnya pemerintah ketika harus bersikap terhadap tuduhan diskriminasi terhadap Muslim Uighur di Xinjiang,⁶ (3) diberikannya izin masuk kepada pekerja migran Cina kala pandemi, padahal banyak pekerja setempat yang mengalami pemutusan hubungan kerja, dan (4) relatif tidak tanggapnya pemerintah terhadap rendahnya standar perusahaan Cina di daerah-daerah penghasil nikel sehingga sering terjadi kerusakan lingkungan dan kecelakaan kerja. Dalam isu-isu tersebut, menurut Rakhmat dan Purnama, pemerintah Indonesia menunjukkan sikap kehati-hatian yang terkesan berlebihan, mungkin karena Cina merupakan mitra ekonomi terbesar Indonesia saat ini. Semua ini pada gilirannya membuat pemerintah Indonesia terkesan gamang ketika harus menghadapi persoalan geopolitik yang sensitif dalam kaitannya dengan hubungan bilateral dan peran Cina di kawasan (Rakhmat, Purnama & Yudhistira, 2024).

Dalam konteks pertimbangan non-ekonomi itulah Daniel Peterson (2023) menulis bahwa Indonesia sudah sepantasnya berhati-hati, atau bahkan curiga, terhadap Cina. Peterson memang tidak menyinggung secara spesifik isu “jebakan utang.” Namun, ia berargumen bahwa utang besar dari Cina untuk membantu pembangunan infrastruktur⁷ telah menempatkan negeri tersebut tidak

⁶ Pengamat relasi Indonesia-Cina Dr. Christine Susanna Tjhin dari Gentala Institute menilai bahwa cenderung diamnya pemerintah Indonesia terhadap tuduhan diskriminasi atas Muslim Uighur di Xinjiang merupakan bentuk simplifikasi dari kompleksitas inheren isu tersebut. Menurut ia, sepiunya pembahasan pemerintah terkait Xinjiang tidak bisa dilepaskan dari persepsi elite (dan sebagian masyarakat) terhadap faktor potensi ancaman separatisme, konservatisme/radikalisme, terorisme, dan deradikalisasi yang dihadapi oleh Indonesia lebih daripada khawatir akan kehilangan investasi atau ditagih utang oleh Cina (komunikasi pribadi, 25 Juni 2025).

⁷ Proyek-proyek infrastruktur seperti Whoosh, Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah, dan Kayan River Hydroelectric Power Plant di Kalimantan Utara disebut oleh Peterson sebagai “kuda Troya” yang memungkinkan Cina untuk mempertahankan kehadirannya secara fisik di Indonesia untuk waktu yang lama.

saja dalam posisi yang baik untuk memengaruhi politik luar negeri Indonesia, tetapi juga meningkatkan peluang bagi aspirasi ekspansionisnya di kawasan. Contoh terdekat aspirasi ekspansionis Cina bagi Indonesia adalah keengganan Cina untuk menerima sepenuhnya Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara, yang bersisian dengan Laut Cina Selatan, salah satu arena konflik yang panas di kawasan. Cina menganggap wilayah Laut Natuna Utara adalah bagian dari lingkup “sembilan garis putus-putus” dan wilayah tradisional tangkapan ikan para nelayannya. Situasi ini sering menjadi sumber *clash* antara nelayan Cina serta kapal-kapal patroli laut Indonesia dan Cina (Darmawan, 2023; Yuniar, 2023; Darmayadi & Purnamasari, 2023). Serangan (*incursions*) Cina terhadap kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara dinilai oleh Peterson sebagai salah satu dari tiga faktor utama yang menentukan arah relasi Indonesia dan Cina. Dua yang lain adalah sentimen anti-Cina yang tidak mudah hilang di sebagian kalangan masyarakat Indonesia serta keuntungan finansial yang diperoleh elite politik dan bisnis Indonesia dari dimensi ekonomi hubungan kedua negara. Terlepas dari perspektif non-ekonomi ini, ada juga yang berpendapat Indonesia belum terperangkap dalam “jebakan utang” Cina mengingat kondisi ekonomi nasional yang cukup kuat sejauh ini dan tidak ada proyek BRI yang pengelolaannya diserahkan kepada Cina karena pemerintah tidak mampu membayar utang. Tidak bisa dipungkiri bahwa sampai dengan saat ini Cina adalah salah satu mitra utama kerja sama pembangunan internasional Indonesia (Sumarwan, 2024).

Saya cenderung berpendapat bahwa, jika hanya merujuk pada pertimbangan ekonomi, sampai dengan saat ini belum ada bukti cukup kuat yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah “Sri Lanka yang lain.” Situasi pelik yang melingkupi persoalan utang Indonesia kepada Cina tidak sepenuhnya bisa disebut sebagai telah memerangkap negara ini dalam jebakan utang. Namun demikian, jika kita juga melihat isu ini secara luas melalui perspektif non-ekonomi, kita mungkin bisa memahami pendapat sebagian pihak bahwa Indonesia saat ini “terjebak

dalam utang,”⁸ dan sebagai konsekuensinya negeri ini menghadapi sebuah persoalan sangat serius, mendukung argumen Peterson (2023), yaitu “simpul Gordian.” Peterson menilai pemerintah Indonesia “*enmeshed in a Gordian knot: unable to resist further Chinese investment, but economically beholden to China and therefore limited in how it can protest and object to subsequent Chinese incursions in its EEZ in the North Natuna Sea*” (“terjerat dalam simpul Gordian: tidak dapat menolak investasi Cina lebih lanjut, tetapi secara ekonomi terikat pada Cina dan oleh karena itu terbatas dalam hal bagaimana mereka dapat memprotes dan mengajukan keberatan atas serangan Cina berikutnya di ZEE-nya di Laut Natuna Utara”). Utang yang kian besar menjadi bagian tidak terpisahkan dari relasi ekonomi antara Indonesia dan Cina. Mengharapkan Indonesia akan membatasi atau menghentikan hubungan ekonomi dengan Cina tampaknya adalah hal yang tidak realistis, mengingat Indonesia masih membutuhkan banyak bantuan eksternal untuk mengembangkan pembangunan nasionalnya. Sangat sulit untuk mengurai dilema utang kepada Cina ini. Belum lagi, jika kita sependapat dengan argumen bahwa terdapat peluang pemanfaatan utang untuk pengaruh politik Cina dan sebagian dari utang digunakan oleh elite politik dan bisnis Indonesia untuk kepentingan mereka sendiri.

Berasal dari mitologi Yunani, “simpul Gordian” menggambarkan sebuah simpul tali yang sangat rumit dan kuat sehingga sangat sulit untuk diuraikan. “Simpul Gordian” konon dibuat oleh Gordios, ayah Raja Midas, tetapi kemudian berhasil diputus oleh Alexander yang Agung, sebuah pertanda bagi keberhasilannya kemudian menguasai sebagian besar Asia.⁹ Terdapat dua versi dalam

⁸ Terima kasih kepada Dr. Ardhitya E.Y. Lalisang dari Departemen Hubungan Internasional (DHI) Universitas Indonesia untuk frasa ini (komunikasi pribadi, 24 Juni 2025).

⁹ Bersama istrinya, Gordios tiba di sebuah kota dengan kereta mereka dan penduduk setempat langsung mengangkat ia sebagai raja. Rupanya, mereka baru saja menerima ramalan bahwa pemimpin baru mereka akan datang menaiki kereta lembu. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Zeus atas takdir besar yang diberikan kepadanya, Gordian mempersembahkan kereta yang ia tumpangi di Kuil Zeus. Kuk kereta diikat dengan simpul luar biasa rumit sehingga mustahil untuk dilepaskan, yang kemudian disebut

sejarah tentang bagaimana Alexander yang Agung menghadapi “simpul Gordian.” Versi pertama adalah Alexander mengayunkan pedangnya dan menebas simpul itu dalam satu gerakan cepat, menandai pendekatan langsung dan tegas dalam menghadapi tantangan. Sementara itu, versi kedua menceritakan bahwa Alexander tidak memotong simpul, melainkan melepas pasak yang mengikat simpul pada tempatnya. Entah versi cerita mana yang benar, kedua cara tersebut menggambarkan bagaimana suatu masalah rumit bisa diselesaikan dengan solusi yang cerdas, bijak, dan berani. Jika saya bisa menambahkan, melepas pasak tampaknya akan lebih mudah jika sebelumnya simpul dapat diuraikan dengan sekuat tenaga. Dari sini, “mengurai simpul Gordian” menjadi ungkapan yang saya gunakan untuk menggambarkan solusi inovatif dan langsung terhadap masalah yang tampaknya tidak terpecahkan (Dunn, 2024), seperti persoalan utang luar negeri dari Cina.

Pidato ini mengibaratkan utang luar negeri Indonesia kepada Cina sebagai “simpul Gordian” karena masalah utang tersebut merupakan gabungan dari dugaan ketergantungan ekonomi, tantangan kedaulatan wilayah, dan kepentingan politik dengan konsekuensi-konsekuensi yang tidak mudah. *Magnitude* masalah ini terletak pada bagaimana Indonesia bergantung pada pinjaman dari Cina untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur berskala besar, sementara Cina boleh jadi memanfaatkan pinjaman tersebut sebagai alat strategis untuk memajukan kepentingan geopolitiknya, terutama di wilayah-wilayah sensitif seperti Laut Natuna Utara. Menambah rumit situasi adalah terdapatnya keterkaitan antara elite politik dan bisnis dalam negeri dengan investasi Cina, yang berarti bahwa relasi finansial ini tidak murni bersifat ekonomi. Dengan merujuk Peterson (2023), dapat dipahami bahwa di balik utang terdapat tawar-menawar politik antara elite politik dan bisnis kedua negara, di mana Indonesia meyakini bahwa keengganan Cina mengakui sepenuhnya kedaulatan Indonesia di

sebagai “simpul Gordian.” Ramalan kuno menyatakan bahwa siapa pun yang berhasil menguraikan simpul ini akan menjadi penguasa Asia (Dunn, 2024). Saya berterima kasih kepada dua mahasiswa Program Magister Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada Angkatan 2024, Intan Annisa Putri dan Imam Syafie, untuk keterangan tentang “simpul Gordian” ini.

Laut Natuna Utara dapat cukup diterima atau diminimalkan sebagai imbalan atas kontrak infrastruktur. Setidaknya, inilah pandangan yang mengemuka ketika publik Indonesia dibuat heboh dengan salah satu hasil kunjungan Presiden Prabowo ke Beijing pada November 2024, yaitu kesepakatan kedua negara tentang “*joint development in areas of overlapping claims*” (pengembangan bersama di wilayah-wilayah dengan klaim kepemilikan yang tumpang tindih). Kesepakatan ini memberi kesan bahwa Indonesia mengakui klaim “sembilan garis putus-putus” Cina yang juga meliputi Laut Natuna Utara (Rachman, 2024; Strangio, 2024). Perpaduan antara kepentingan rezim domestik, insentif ekonomi, dan kebijakan strategis luar negeri ini menjadikan upaya memisahkan utang dari masalah keamanan dan kedaulatan nasional yang lebih luas menjadi sangat sulit.

Hadirin yang saya hormati,

Situasi yang melingkupi pembiayaan proyek-proyek BRI di Indonesia menimbulkan diskusi tentang pengelolaan risiko utang dan manfaat jangka panjang. Perlu pengelolaan utang yang bijak dan berhati-hati agar proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai dengan pinjaman tidak membebani keuangan negara dan pada saat yang sama tetap mendukung pertumbuhan ekonomi. Menghadapi tantangan “simpul Gordian” berupa utang luar negeri untuk pembiayaan proyek BRI, pemerintah Indonesia perlu mengadopsi strategi yang cermat dan berimbang, lebih menyerupai versi kedua dengan sedikit modifikasi dari cerita Alexander yang Agung di atas.

Strategi utama melibatkan diversifikasi sumber pembiayaan untuk mengurangi ketergantungan yang berlebihan pada pinjaman Cina. Indonesia bisa lebih aktif lagi melibatkan diri dengan lembaga-lembaga pembiayaan pembangunan multilateral seperti Bank Pembangunan Asia, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Islam. Kemudian, pemerintah juga bisa memberikan insentif yang luas, dengan dasar hukum yang kuat, transparan, dan adil, untuk menarik investor swasta baik domestik maupun internasional sehingga mereka dapat memobilisasi modal untuk proyek-proyek infrastruktur sekaligus mendistribusikan risiko keuangan secara lebih luas (Guild, 2023). Dalam konteks ini, pemerintah juga dapat mengeksplorasi mekanisme

pembiayaan inovatif seperti pembiayaan campuran antara dana publik dan instrumen pembiayaan hijau (Ma & Chang, 2023) untuk memperluas basis pendanaan pembangunan serta menyesuaikan pembangunan infrastruktur dengan tujuan-tujuan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial.

Berkaca dari pengalaman proyek Whoosh, pemerintah perlu senantiasa **meningkatkan kapasitas negosiasi dan pengawasan dalam hal penilaian risiko, analisis keuangan, serta transparansi dan akuntabilitas proyek.** Peminjaman dana untuk pembiayaan proyek BRI tidak boleh lagi dilakukan tanpa konsultasi publik. Transparansi dalam negosiasi dan pelaporan pinjaman harus ditingkatkan agar publik dan pemangku kepentingan dapat memantau perkembangan utang secara terbuka (Ananda & Fahreza, 2024). Dengan demikian, diharapkan tidak saja pemerintah bisa mendapatkan persyaratan pinjaman yang lebih fleksibel, tetapi juga memitigasi potensi risiko fiskal yang terkait dengan pinjaman infrastruktur berskala besar. Pada akhirnya, **strategi mekanisme tata kelola ini dapat membantu membangun kepercayaan publik, mengurangi kesalahan informasi, serta memfasilitasi dialog konstruktif di antara pihak-pihak terkait dengan proyek infrastruktur BRI dan pembiayaannya** (Rakhmat & Purnama, 2023). Penguatan tata kelola dan mekanisme pengawasan proyek BRI perlu menjadi prioritas utama agar proyek berjalan sesuai rencana dengan penggunaan anggaran yang efisien dan meminimalkan risiko korupsi (Nicola, 2023).

Strategi pengelolaan utang yang disiplin dan transparan diperlukan untuk **melakukan evaluasi risiko utang secara menyeluruh, termasuk analisis mendalam terhadap dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari setiap proyek, sebelum menyetujui pinjaman baru.** Penting bagi pemerintah Indonesia untuk menerapkan strategi pengelolaan utang yang kuat dan memastikan transparansi dalam perjanjian pinjaman (Ananda & Fahreza, 2024). Pemerintah harus memastikan bahwa setiap pinjaman yang diambil memiliki tujuan yang jelas dan berkelanjutan serta dapat dikembalikan secara realistis. Tidak semua proyek infrastruktur yang ditawarkan dalam kerangka BRI harus diterima secara otomatis. **Proyek yang dipilih harus memiliki nilai tambah yang signifikan bagi pembangunan**

nasional, mampu meningkatkan produktivitas dan konektivitas, serta tidak menimbulkan risiko lingkungan yang besar. Proyek juga harus dirancang dengan prinsip inklusivitas, melibatkan partisipasi masyarakat lokal dan memperhatikan aspek sosial agar tidak menimbulkan konflik atau resistensi. Semua ini sangat penting mengingat terdapat rencana proyek yang mungkin kembali dibiayai dengan utang dari Cina: pengembangan jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung yang diteruskan menuju Surabaya. Pengembangan jalur hingga ke Surabaya, apabila benar terealisasi, harus dipastikan berjalan secara *business-to-business* dan tidak menggunakan anggaran negara. Jika tidak, maka penilaian bahwa Indonesia terperangkap dalam "jebakan utang" Cina boleh jadi akan semakin mendapatkan pembenarannya (Sasmita, 2023; TEMPO, 2023b). Di samping itu, rencana proyek ini berpotensi akan gagal mengatasi persoalan transportasi umum dan, dengan proyeksi harga tiket yang sangat mahal, hanya akan menguntungkan mereka yang berpenghasilan lebih daripada masyarakat kebanyakan (Imaduddin & Askar, 2024).

Selanjutnya, diperlukan sinergi kebijakan dari berbagai pemangku kepentingan agar proyek-proyek BRI berkontribusi pada peningkatan ekonomi yang berkelanjutan dan bukannya melanggengkan ketergantungan ekonomi. Ini bisa ditempuh dengan **memajukan upaya transfer teknologi serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan industri lokal** (Ananda & Fahreza, 2024). Strategi di atas diperlukan agar kapasitas sektor manufaktur dan jasa dalam negeri semakin meningkat serta kemampuan Indonesia dalam mengelola dan mengoperasikan infrastruktur yang dibangun semakin baik (Yeung & Huber, 2024). Tujuan lain dari langkah ini adalah menciptakan lapangan kerja yang bernilai tambah serta meningkatkan kapasitas dan kapabilitas industri Indonesia untuk berinovasi dan bersaing secara global. Dengan demikian, proyek BRI di Indonesia dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks hubungan bilateral, pemerintah perlu secara berkesinambungan **merancang dan menjalankan pendekatan diplomatik yang cermat untuk menjaga kemitraan strategis dengan Cina tanpa mengorbankan kepentingan nasional**

(Wuryandari, 2018). Pemerintah Indonesia harus mendorong dialog terbuka dan negosiasi yang transparan dalam setiap kesepakatan proyek pembangunan dengan Cina. Dennis McCann mengingatkan bahwa implikasi dialog ini tidak sederhana: “*Dialogue with China challenges us to reflect on our experiences of friendship, how these began, how they developed, how they survived various crises*” (2022, p. 6). Meski demikian, dialog harus benar-benar diusahakan demi memastikan bahwa kepentingan nasional dan kedaulatan ekonomi tetap terjaga. Jangan sampai kembali muncul kesan bahwa Indonesia secara politik tersandera oleh kepentingan Cina. Diplomasi ekonomi yang aktif juga dapat membuka peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan pasar, teknologi, transfer pengetahuan, dan kerja sama yang lebih luas di luar aspek pembiayaan semata (Handoko, 2024; Rivai, 2024). Ini harus menjadi prioritas utama pemerintah agar bantuan yang dijanjikan Beijing untuk proyek Makan Bergizi Gratis (MBG),¹⁰ misalnya, atau sejumlah kesepakatan ekonomi buah dari kunjungan Perdana Menteri Li Qiang ke Jakarta pada tanggal 24–26 Mei 2025¹¹ tidak menjadi

¹⁰ Bantuan Cina untuk MBG tercantum dalam *Food Supplementation and School Feeding Programme in Indonesia* yang merupakan bagian dari Nota Kesepahaman antara kedua pemerintah, yang dicapai dalam kunjungan Prabowo ke Beijing, 9–11 November 2024. Indonesia dan Cina menyepakati paket kerja sama senilai \$10,07 miliar atau setara dengan Rp157,64 triliun (BBC, 2024; Yanwardhana, 2024).

¹¹ Secara total, terdapat 12 kesepakatan kerja sama yang dihasilkan dari pertemuan antara Prabowo dan Li. Yang utama adalah empat Nota Kesepahaman: antara Bank Indonesia dan People’s Bank of China mengenai pembentukan kerangka kerja sama untuk mendorong transaksi bilateral dalam mata uang lokal; antara Dewan Ekonomi Nasional dan the National Development and Reform Commission mengenai kerja sama dalam kebijakan pembangunan ekonomi; antara Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan Cina mengenai penguatan kerja sama di bidang industri dan rantai pasok; serta antara Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia serta Kementerian Perdagangan Cina dan Pemerintah Provinsi Fujian mengenai kerja sama *two countries twin park*. Ini semua dilengkapi dengan delapan dokumen kerja sama di bidang pariwisata, ekspor pertanian, pengobatan tradisional, pencegahan dan pengendalian tuberkulosis, investasi, bisnis strategis, kolaborasi media, serta kantor berita (Kumparan, 2025).

saluran baru bagi ketergantungan ekonomi atau bahkan “jebakan utang” yang terus dikhawatirkan dan diperdebatkan.

Yang terakhir, pemerintah harus **menyiapkan mekanisme mitigasi risiko yang komprehensif untuk menghadapi potensi masalah yang mungkin timbul selama pelaksanaan pembangunan proyek-proyek BRI** (Ananda & Fahreza, 2024). Ini termasuk risiko finansial, politik, sosial, dan lingkungan. Misalnya, pemerintah dapat membentuk dana cadangan atau asuransi risiko proyek, melakukan analisis dampak sosial dan lingkungan secara berkala, serta membangun forum komunikasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menangani keluhan dan konflik secara cepat dan efektif. Pendekatan ini akan membantu menjaga kelangsungan proyek dan meminimalkan dampak negatif yang mungkin terjadi.

Hadirin yang saya muliakan,

Menegaskan yang telah saya sampaikan di bagian awal, pidato ini mengedepankan pentingnya analisis pembangunan internasional yang tidak hanya berfokus pada hasil ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan dimensi politik-strategis, kedaulatan bangsa, kepentingan nasional, dan dinamika geopolitik global. Pemerintah harus memajukan strategi pengelolaan utang luar negeri yang menyeluruh dengan mengintegrasikan berbagai kekuatan politik domestik dan aktor internasional. Pendekatan ini sekaligus membuka ruang bagi inovasi kebijakan dan kolaborasi internasional (Matthews, 2010) yang lebih adil dan berimbang, khususnya dalam konteks relasi Indonesia dan Cina.

Keterkaitan antara pembangunan internasional di Asia Timur, *Belt and Road Initiative*, dan hubungan Indonesia-Cina bersifat multidimensi. Hubungan multidimensi yang dinamis ini dibentuk oleh kebutuhan ekonomi dan pertimbangan geopolitik. BRI berfungsi sebagai wahana yang menyelaraskan strategi pembangunan internasional Cina dengan ambisi infrastruktur Indonesia, memberikan peluang untuk pertumbuhan ekonomi dan integrasi regional. Pada saat yang sama, keterlibatan Indonesia dengan BRI mencerminkan tren yang semakin berkembang terhadap konektivitas dan kerja sama kawasan, sekaligus menyoroti tantangan yang melekat dalam mengelola investasi

asing berskala besar dan mempertahankan kedaulatan ekonomi. Dalam konteks ini, isu ”jebakan utang” dari Cina tidak hanya berdampak pada ekonomi makro, tetapi juga memengaruhi persepsi publik dan politik domestik. Secara lebih luas, ketergantungan ekonomi dapat menimbulkan ketegangan geopolitik, terutama dalam konteks persaingan kekuatan global di kawasan, di mana pengaruh Cina semakin terasa. Hubungan ekonomi yang semakin erat dengan Cina memerlukan tindakan penyeimbangan diplomatik yang rumit, karena Indonesia berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari investasi Cina sambil mempertahankan otonomi strategis dan hubungan dengan mitra-mitra lainnya. Kemampuan Indonesia untuk menavigasi kompleksitas geopolitik ini akan sangat penting dalam membentuk arsitektur masa depan kerja sama dan keamanan kawasan. Dalam konteks inilah pengelolaan risiko utang menjadi kunci agar hubungan bilateral dapat berjalan seimbang dan berkelanjutan.

Di tahun ini kita menyaksikan pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat, diperkirakan pada angka rerata tahunan 2,9%, turun dari 3,3% pada tahun 2024—*thanks, but no thanks, to*, antara lain, kebijakan tarif *Liberation Day* Donald Trump. Pertumbuhan ekonomi Cina diperoyeksikan akan turun 0,5% tahun ini daripada pencapaian di tahun sebelumnya (Morgan Stanley, 2025). Di Indonesia, pendapatan negara dari pajak tidak sesuai dengan yang diharapkan, sementara bagian signifikan dari penerimaan negara mungkin akan digunakan untuk membayar pokok dan bunga utang yang telah jatuh tempo, bukannya untuk kegiatan produktif (Celios, 2023). Pemerintah Indonesia di tahun 2025 menerapkan kebijakan efisiensi, pengurangan anggaran negara untuk pos-pos pengeluaran yang tidak dianggap perlu atau mendesak. Sebagai konsekuensinya, pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan yang menysar langsung kebutuhan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi rakyat bisa jadi akan berkurang. Meskipun mendatangkan potensi penghematan keuangan negara, kebijakan ekonomi pemerintah ini rupanya tidak direspons dengan cukup baik oleh rakyat. Sebuah studi tentang tata kelola anggaran dalam 100 hari pemerintahan Prabowo, misalnya, menemukan bahwa dari 95 jurnalis nasional sebagai responden, sebanyak 18% menjawab sangat buruk, 52% buruk, 26% cukup, dan hanya 4% yang

menilai baik (Askar et.al, 2025, p. 8). Keterbatasan ruang fiskal di saat kebutuhan anggaran pembangunan yang sangat besar¹² sejalan dengan “pelemahan data pembeli masyarakat, maraknya PHK di sektor padat karya, dan kekhawatiran adanya risiko global seperti perang dagang yang menurunkan potensi pertumbuhan ekonomi” (Askar et.al, 2025, p. 20).

Potensi “jebakan utang” Cina telah menjadi topik perdebatan dan kekhawatiran publik yang meluas di Indonesia. Meskipun bukti empirisnya masih diperdebatkan, potensi tersebut dapat mempengaruhi kepercayaan investor dan stabilitas politik dalam negeri. Isu “jebakan utang” dalam konteks proyek BRI bukanlah persoalan yang mudah untuk diselesaikan. Ia menyerupai sebuah “simpul Gordian,” sebuah masalah kompleks yang membutuhkan pendekatan kreatif dan kehati-hatian dalam memahami berbagai variabel yang berperan. Pada titik ini, saya membayangkan munculnya Alexander versi Indonesia, yang dapat menguraikan “simpul Gordian” dengan pedang berupa kebijakan-kebijakan fiskal yang dapat menekan laju utang sehingga defisit anggaran bisa ditekan sedikit demi sedikit. Dengan menerapkan kebijakan ini secara hati-hati, transparan, dan berkelanjutan, Indonesia tidak hanya akan memaksimalkan manfaat dari proyek BRI, tetapi juga menjaga kedaulatan nasional dan stabilitas ekonomi serta berkontribusi pada kawasan yang lebih terintegrasi dan sejahtera. Pendekatan ini juga berpotensi menjadi model bagi negara berkembang lain yang menghadapi tantangan serupa dalam pengelolaan proyek pembangunan yang didanai oleh negara atau lembaga donor asing.

Dari perspektif pembangunan internasional, jebakan utang sering kali menjadi bagian dari perbincangan yang lebih luas tentang

¹² Sampai dengan Juni 2025, tercatat ada 11 program andalan pemerintahan Prabowo, yang totalnya memerlukan anggaran sebesar Rp446 triliun. Program-program tersebut adalah Koperasi Desa Merah Putih (Rp200 triliun), MBG (Rp121 triliun), 3 Juta Rumah (Rp41,88 triliun), lumbung pangan (Rp23,16 triliun), pembangunan bendungan dan irigasi (Rp20,5 triliun), rehabilitasi sekolah (Rp19,5 triliun), Sekolah Rakyat (Rp11,6 triliun), cek kesehatan gratis (Rp3,4 triliun), Sekolah Unggul Garuda (Rp2 triliun), rumah sakit berkualitas (Rp1,7 triliun), dan penuntasan tuberkulosis (Rp1,5 triliun). Ini belum termasuk paket stimulus ekonomi yang diumumkan pada awal bulan Juni, yang diperkirakan menelan biaya hingga Rp24,44 triliun (Shaïd, 2025).

hubungan antara negara-negara berkembang dan donor atau investor asing, di mana terdapat ketegangan antara ekspektasi pertumbuhan ekonomi dan risiko ketergantungan finansial. Isu jebakan utang juga mencerminkan dilema struktural mengenai kedaulatan ekonomi dan dinamika kekuatan global. Dalam konteks inilah, jebakan utang tidak boleh menjadi narasi tunggal yang terus membayangi solusi efektif untuk persoalan pembiayaan pembangunan di *Global South*. Kebijakan mengatasi utang harus didasarkan pada analisis yang komprehensif dan multidisiplin. Dengan pendekatan inilah kita dapat terus membuka ruang dialog yang berimbang, mempertimbangkan setiap sudut pandang dengan penuh keterbukaan dan sikap ilmiah, serta merumuskan penyelesaian utang yang tidak hanya mengatasi masalah, tetapi juga memaksimalkan potensi kerja sama internasional dalam konteks pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

Hadirin yang saya hormati,

Jabatan fungsional Guru Besar merupakan manifestasi dari kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak sepanjang perjalanan akademik seseorang. Profesor bukan hanya sebuah gelar, tetapi juga sebagai lambang pengabdian bersama dan semangat terus belajar yang dirajut oleh banyak tangan. Saya harus memberikan apresiasi kepada mereka yang bersama-sama merajut pencapaian ini.

Terima kasih kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia; Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek; Rektor, Senat Akademik, dan Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada; Senat Fakultas, Dekan, para Wakil Dekan, serta para Ketua dan Sekretaris Departemen di lingkungan FISIPOL Universitas Gadjah Mada, atas segala dukungan yang diberikan dalam proses pengurusan jabatan guru besar saya.

Kepada para peninjau (*reviewers*), Prof. Dr. Mohtar Mas'ood dan Prof. Dr. Poppy Sulistyning Winanti, terima kasih atas segala masukan, komentar, dan kritik membangun untuk membuat naskah pidato ini menjadi lebih baik. Begitu juga untuk hal serupa yang diberikan oleh dua kolega saya di Departemen, Dr. Diah Kusumaningrum dan Dr. Randy Wirasta Nandyatama, serta Dr.

Ardhitya Eduard Yeremia Lalisang dari Universitas Indonesia dan Dr. Christine Susanna Tjhin dari Gentala Institute. Tidak mudah membuat pidato yang formal-akademis di satu sisi, tetapi juga dengan bahasa yang mudah dimengerti untuk dapat tersampaikan dengan baik—mereka semua telah membantu saya untuk ini.

Sampai dengan hari ini, *alhamdulillah*, saya telah menjalani karier akademis selama 26 tahun di satu lembaga: Departemen (dahulu Jurusan) Ilmu Hubungan Internasional FISIPOL Universitas Gadjah Mada. DIHI tidak saja mengajarkan, misalnya, soal perang dan damai, kerja sama internasional, maupun norma dan ide dalam hubungan antarbangsa, tetapi lebih dari itu ia juga memberikan banyak pengalaman hidup berharga kepada saya. Di urutan pertama, saya menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada guru yang telah memperkenalkan saya kepada studi tentang Cina: Alm. Drs. Sugiono, MA. Banyak membimbing di tahun-tahun awal pengabdian saya sebagai dosen, beliau berpulang pada tahun 2003 ketika saya sedang menempuh studi Master. Terima kasih juga kepada para guru yang dari mereka saya mendapatkan banyak ilmu: Alm. Prof. Idris A. Kesuma, Alm. Drs. Ismail Gani, Almh. Dra. Soelistyati Ismail Gani, Alm. Prof. Dr. Ichlasul Amal, Alm. Prof. Dr. Jahja A. Muhaimin, Alm. Prof. Dr. Budi Winarno, Alm. Dr. Samsu Rizal Panggabean, dan Alm. Dr. Riza Noer Arfani. Semoga Allah menerima segala amal dan mengampuni segala kesalahan beliau semua. Tidak ketinggalan, saya pun berterima kasih kepada Prof. Dr. M. Amien Rais, Dra. Ilien Halina, M.Si, dan Dr. Nanang Pamuji Mugasejati.

Terima kasih sebesar-besarnya untuk para kolega di DIHI: Prof. Dr. Mohtar Mas'ood; Drs. Usmar Salam, MIntStu; Prof. Dr. Dafri, MA; Prof. Dr. Siti Muti'ah Setiawati, MA; Dra. Siti Daulah Khoiriaty, MA; Drs. Muhadi Sugiono, MA; Dr. Ririn Tri Nurhayati; Prof. Dr. Poppy Sulistyaning Winanti; Dr. Diah Kusumaningrum; Dr. Maharani Hapsari; Dr. Rochdi Mohan Nazala; Dr. Titik Firawati; Dr. Atin Prabandari; Dr. Luqman-nul Hakim; Dr. Dedy Permadi; Dr. Muhammad Rum; Dr. Suci Lestari Yuana; Dr. Randy Wirasta Nandyatama; Ayu Diasti Rahmawati, MA; Raras Cahyafitri, MSc; Yunizar Adiputera, MA; Yulida Nuraini Santoso, MSc; Treviliana Eka Putri, MIntSec; Muhammad Irfan Ardhani, MIR; Rizky Alif Alvian,

MIR; Marwa, MSc; dan Arindha Nityasari, MCyberSecAnalysis. *Matur nuwun* kepada para staf tenaga kependidikan Departemen dan staf Institute of International Studies: Edi Priyono, SIP; Ivana Mandasari, S.Pd; Tri Nayati, S.Pd; Rini Kusumawati, MM; Galih Fatria Akbar, SIP; Nurhawira Gigih Pramono, SIP; Rifqie Zullian, SIP; Tri Nur Chasanah, SIP; Laila Maharani, S.P.; Syafa Azmi Syakirah, M.Pd.; Amirah Syahirah, S.Sos; Nabilah Nur Abiyanti, M.Phil; Nadya Zafira, SIP; Inggit Kartika Dini, SIP; Rama Ardhia Prastita, SIP; dan Dian Adi Marianto, MA. Terima kasih untuk Felix Brosn Manurung, MA, lulusan terbaru Program Magister Ilmu HI UGM, yang telah banyak membantu tugas kepanitiaan. Apresiasi juga saya sampaikan kepada Kepala Kantor Administrasi FISIPOL UGM Paminto Adhi, SE, M.Si. dan jajarannya untuk bantuan proses administrasi yang luar biasa: Uling Sumbogo, SIP; Suparyanto, SIP; Neny Susilowati, S.S.; dan Bambang Wijanarko.

Apresiasi juga saya sampaikan kepada para guru dan rekan saya di Flinders University: Alm. Dr. Jim Schiller, Dr. Michael Sullivan, Dr. Priyambudi Sulistiyanto, Dr. Alex Stephens, Dr. Himawan Bayu Patriadi, Prof. Dr. Sukawarsini Djelantik, Prof. Dr. Ahmad Ali Nurdin, Dr. Andry Indradi, dan Dr. Achmad Khoirul Umam; rekan-rekan pegiat Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII), terutama para ketua di periode masing-masing: Dr. Sugeng Riyanto, M.Si., Prof. Dr. Tirta Mursitama, PhD, Dr. Yusran, Dr. Asep Kamaluddin Nashir, dan Dr. Agus Haryanto; kawan-kawan seangkatan HI UGM Tahun 1992, khususnya Hikmatul Akbar, M.Si., Dr. Fauzan, Dr. Ariesani Hermawanto, Om Hary Prasetyawan, dan Dr. Ririn Tri Nurhayati; para jamaah haji Rombongan 5 Multazam tahun 2016, terutama Ustadz dr. Moerlani Dahlan, Sp.PD, Ustadz Ahmad Mustafid, Pak Wahmad, Pak Mujiyo, dan Bu Imam; dr. Dewi Ari Mulyani, Sp. Rad., MSc, Mbak Wahyu, dan staf lainnya dari Klinik Sido Waras serta dr. Diah Marinda, Sp.PD dari RS Ludira Husada Tama; Bapak Ibnu dan Ibu Susi Garindra, pemilik kos di Sagan, Terban, Gondokusuman yang saya tempati selama kuliah S-1; serta para warga Tetuko, Kalurahan Sidoarum, Kepanewon Godean, Kabupaten Sleman.

Terima kasih untuk segala doa dan dukungan dari keluarga besar: Alm. Pakdhe Ismudijato dan Budhe Samsiyati, juga Mbak Astuti

Nurwidiyanti dan Mbak Novi Dwi Waluyanti yang telah berkenan menerima saya sebagai “anak” dan “adik lelaki,” Mbak Emmy Purwanti (semoga Allah meringankan penyakitmu, aamiin) dan Mas Suyanto; Om Ismuharjono dan Bulik Budiarti; Bulik Ismuastuti dan Alm. Om Ahmad Samsuri; Pakdhe Agus Djoko Indarto dan Budhe Dwi Astuti; Alm. Bulik Darmanti Pudji Utami dan Om Tenang Santoso; Om Muladi Djoko Riswanto dan Bulik Istiqomah; Bulik Niken Susilawati dan Om Hamdani; Om Joko Hari Wahyuno dan Bulik Wiwin Nurbiyanti; Om Joko Waluyo Widodo dan Bulik Faktasia Anita; serta segenap sepupu di Yogyakarta dan Jakarta.

Untuk kedua orang tua saya: Almarhumah Ibu Tri Enny Pudjiastuti dan Bapak Ismuantoro, terima kasih atas segala cinta dan kasih sayang yang telah membantu mengantarkan saya mencapai titik ini. Ibu Tasaroh dan Alm. Bapak Sukardi, *matur nuwun* untuk semua nasihat, juga perkenannya menjaga anak-anak selama saya dan istri menunaikan ibadah haji. Adik-adikku Makmur Prasetya Dwiantoro dan Eka Dewi Kurniawan, Amien Affandi Rizkiantoro dan Laily Rakhmawati, Kartiningrum Kusumadewi dan Tri Sugiarto, Ristri Arti dan Martono, Sumarsih dan Anas Suhada, serta Yuli Kurniasari dan Wahyu Sigit Arifiyanto, *thanks a lot for all the support over the years*. Juga untuk keponakan-keponakan saya, baik yang sudah akan kuliah maupun yang masih bocil: Syifa, Syafiq, si kembar Khansa dan Khalishah, Affan, Kayla, Izzah, Zaira, Amri, Yazid, Rayyan, Najmi, Shaquille, dan Meicca.

Terakhir, tentu saja terima kasih tak terhingga untuk istri dan kedua anak saya, Tutiyaningsih serta Muhammad Luthfi Abdul Aziz dan Aisha Hafiza Rahma. *A huge thanks to you all*, Nda, Mas, Mbak, untuk doa, kesabaran, dan dukungan penuh cinta tiada henti. Dengan cara masing-masing, kalian adalah cahaya penyemangat bagi Ayah di segala suasana.

Hadirin sekalian, perkenankan saya menutup pidato ini dengan membacakan lima ayat pertama dari Surah Al ‘Alaq, yang juga merupakan ayat-ayat pertama yang diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW:

Bismillahirrahmanirrahiim

Iqra' bismirabbikalladzii khalaq. Khalaqal insaana min 'alaq. Iqra' warabbuka 'l-akram. Alladzii 'allama bil qalam. 'Allama 'l-insaana maa lam ya 'lam.

“Dengan Nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.”

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu-lah Yang Mahamulia. Yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan (kepada) manusia apa yang tidak diketahuinya.”

Kelima ayat ini merefleksikan kemuliaan dan keutamaan ilmu pengetahuan dan mereka yang memilikinya. Tuhan Yang Maha Kuasa telah menciptakan manusia dari unsur-unsur materi. Setelah itu, Dia memberkati manusia dengan kemampuan untuk membaca dan memahami makna dari apa yang dibacanya. Kemampuan ini dilengkapi dengan kapasitas tambahan untuk menggunakan pena, yang digunakan oleh manusia untuk melakukan sistematisasi dan melestarikan pengetahuannya. Lebih lanjut, kemampuan membaca memungkinkan manusia untuk memperoleh pengetahuan dan kemampuan menggunakan pena membuat ia mampu menyebarkan pengetahuan kepada orang lain dalam skala yang besar. Pena, *al qalam*, dapat disebut sebagai sebuah simbol pengetahuan (Khan, 2025). Menjadi seorang guru besar sesungguhnya hanyalah sebuah noktah yang sangat kecil dari simbol tersebut. Kita semua, dengan kapasitas masing-masing, adalah kumpulan dari noktah-noktah pembentuk pena, yang diharapkan selalu berproses untuk memproduksi dan menggunakan pengetahuan untuk kepentingan kemanusiaan. *Wallaahu a 'lam.*

Semoga Allah merahmati dan meridai kita semua.

Alhamdulillaahi rabb 'l-'aalamiin.

Wassalaamu 'alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, P. (1991). *Odious debts: Loose lending, corruption, and the Third World's environmental legacy*. Toronto: Earthscan Publications.
- Afifah, N. R. N & Badaruddin, M. (2024). Potential Chinese Debt Trap in Infrastructure Development (Case Study of the Jakarta Bandung Highspeed Railway Project). *Indonesian Journal of International Relations*, 8(1). 198–222.
DOI:10.32787/ijir.v8i1.517
- Alaydrus, H. (2024, 15 Agustus). Diam-Diam Utang RI ke China Meroket Nyaris 200% dalam 10 Tahun. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/202408151530111753353/diam-diam-utang-ri-ke-china-meroket-nyaris-200-dalam-10-tahun>
- Alfarizi, M. K. (2023, 16 Juni). Celios Beberkan Negara Terkena Jebakan Utang China, Bagaimana di Indonesia? TEMPO. <https://www.tempo.co/ekonomi/celios-beberkan-negara-terkena-jebakan-utang-china-bagaimana-di-indonesia--176404>
- Ananda, C. F. & Fahreza, R. (2024). The BRI: Debt Management and Narrative of Debt Risk in Indonesia. In Nian Peng & Ming Yu Cheng (eds.), *The Reality and Myth of BRI's Debt Trap: Evidences from Asia and Africa*. 147–162. Singapore: Springer.
- Aulia, L. (2023, 17 Oktober). China Arahkan Proyek Inisiatif Sabuk dan Jalan Lebih Realistis. Kompas. <https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/10/17/china-arahkan-proyek-inisiatif-sabuk-dan-jalan-lebih-realistis>.
- Ayu, R. D, Alfarizi, M. K., Putri, R. S. & Akbar, C. (2023, 22 September). Disebut Sebagai Jebakan China, Berapa Bunga Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung? TEMPO. <https://www.tempo.co/ekonomi/disebut-sebagai-jebakan-china-berapa-bunga-utang-kereta-cepat-jakarta-bandung> 140682
- Barney, K., Rajah, R. & Cooray, M. (2025, 14 April). Trapped in debt: China's role in Laos' economic crisis. Lowy Institute.

- <https://www.lowyinstitute.org/sites/default/files/202504/BARNEY-RAJAH-COORAY-Trapped-in-debt-v2.0.pdf>
- BBC News Indonesia. (2024, 14 November). China bantu Prabowo ongkosi makan bergizi gratis, tapi ‘tidak ada makan siang gratis’ Apa ‘timbang balik’ yang diminta China?
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c04lvd4dw0yo>
- Bräutigam, B. (2019). A critical look at Chinese ‘debt-trap diplomacy’: the rise of a meme. *Area Development and Policy*. DOI: 10.1080/23792949.2019.1689828
- Bräutigam, D. & Rithmire, M. (2021, 6 February). The Chinese ‘Debt Trap’ Is a Myth. *The Atlantic*.
<https://www.theatlantic.com/international/archive/2021/02/china-debt-trap-diplomacy/617953/>
- Brinkerhoff, D. W. (2008). The State and International Development Management: Shifting Tides, Changing Boundaries, and Future Directions. *Public Administration Review*, 68(6).
<https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2008.00948.x>
- Cai, P. (2017, 22 March). Understanding China’s Belt and Road Initiative. Lowy Institute.
<https://www.lowyinstitute.org/publications/understanding-china-s-belt-road-initiative>
- Carmody, P. (2020). Dependence, not debt-trap diplomacy. *Area Development and Policy*.
DOI: 10.1080/23792949.2019.1702471
- Celios. (2023). *Jokowi’s Fiscal Legacy: Notes for Future Government*. Jakarta: Center of Economic and Law Studies.
https://celios.co.id/wp-content/uploads/2024/12/Jokowi_Fiscal_Evaluation_CELIOS_69e6b09225.pdf
- Chandran, R. (2022, 26 August). The Chinese “Debt Trap” Is a Myth. *China Focus*.
<http://www.cnfocus.com/the-chinese-debt-trap-is-a-myth/>
- Chellaney, B. (2017, 23 January). China’s Debt-Trap Diplomacy. *Project Syndicate*.
<https://www.project-syndicate.org/commentary/china-one-belt-one-road-loans-debt-by-brahma-chellaney-2017-01>

- China Power. (2017). How Will the Belt and Road Initiative Advance China's Interests? *China Power*.
<https://chinapower.csis.org/china-belt-and-road-initiative/>
- Clusterr, S., Horigoshi A., Boer, B. & Marshall, K. (2025). *Listening to Leaders 2025: Development cooperation over a decade of disruption*. Williansburg, VAL: AidData at Willian & Mary.
https://docs.aiddata.org/reports/ltl-2025/Listening_to_Leaders_2025.pdf
- Darmawan, A. R. (2023, 6 September). The Fix: Explaining Indonesia's silence in the North Natuna Sea. *The Interpreter*.
<https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/fix-explaining-indonesia-s-silence-north-natuna-sea>
- Darmayadi, A. & Purnamasari, E. N. (2022). Indonesia–China Relations in the Natuna Sea Dispute Resolution: Struggle for Sovereignty. *Journal of Eastern European and Central Asian Research*, 9(1), 41–48. <https://doi.org/10.15549/jeecar.v9i1.870>
- de Oliveira, H. A. & Leite, A. C. C. (2014). Chinese engagement for Global Governance: aiming for a better room at the table? *Revista Brasileira De Política Internacional*, 57.
<https://doi.org/10.1590/0034-7329201400216>
- Dent, C. M. (2016). *East Asian Regionalism* (2nd ed.). London: Routledge.
- Dent, C. M. (2017). East Asian Integration: Towards an East Asian Economic Community. Working Paper No. 665. Asian Development Bank. <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/228896/adbi-wp665.pdf>
- Diahwahyuningtyas, A. & Adhi, I. S. (2025, 15 Mei). Utang Luar Negeri Indonesia Naik, Tembus Rp 7.100 Triliun. *Kompas*.
<https://www.kompas.com/tren/read/2025/05/15/141500465/utang-luar-negeri-indonesia-naik-tembus-rp-7.100-triliun>
- Dunn, M. (2024, 7 February). Inside the Legend of the Gordian Knot and Alexander the Great's Rise to Power. *All That Interesting*.
<https://allthatsinteresting.com/gordian-knot>

- Esteves, P. & Soares, F. L. de T. (2020). Regulated Improvisations: bringing the private sector back into the International Development Cooperation field. *Revista Brasileira de Política Internacional*, 63(2).
<https://doi.org/10.1590/00347329202000212>
- Feingold, S. (2023, 20 November). China's Belt and Road Initiative turns 10. Here's what to know. *World Economic Forum*.
<https://www.weforum.org/stories/2023/11/china-belt-road-initiative-trade-bri-silk-road/>
- Firmansyah, F. (2023, 12 November). Jebakan utang Belt and Road Initiative Cina. *TEMPO*.
<https://www.tempo.co/ekonomi/utang-cina-belt-and-road-initiative-405404>
- Ghossein, T., Hoekman, B., & Shingal, A. (2021). Public Procurement, Regional Integration, and the Belt and Road Initiative. *The World Bank Research Observer*, 36(2), 131–163.
<https://doi.org/10.1093/wbro/lkab004>
- Guild, J. (2023). The Indonesian state and the strategic use of foreign capital. *The Pacific Review*, 36(5), 1094–1119.
<https://doi.org/10.1080/09512748.2023.2200028>
- Handoko, B. (2024, 7 Desember). Diplomasi Ekonomi di Era Prabowo. *Kompas*. <https://www.kompas.id/artikel/diplomasi-ekonomi-di-era-prabowo>
- Hidayat, B. (2021, 13 Oktober). Jebakan Utang Cina. *TEMPO*.
<https://www.tempo.co/kolom/editorial-bahaya-utang-tersembunyi-cina-di-indonesia-845008>
- Hillman, J. E. (2020). *The Emperor's New Road: China and the Project of the Century*. New Haven: Yale University Press and Center for Strategic & International Studies.
- Himmer, M. & Rod, Z. (2023). Chinese debt trap diplomacy: reality or myth? *Journal of the Indian Ocean Region*, 18(3): 250–272. DOI: 10.1080/19480881.2023.2195280
- Hong Liu & Guanie Lim. (2023). When the state goes transnational: The political economy of China's engagement with Indonesia. *Competition & Change*, 27(2). 402–421. DOI: 10.1177/10245294221103069

- Hongyi Lai. (2019, 4 October). Indonesia: The Belt and Road Initiative and relations with China. The Asia Dialogue. <https://theasiadialogue.com/2019/10/04/belt-and-road-initiative-in-indonesia-and-relations-with-china/>
- Horigoshi, A., Custer, S., Burgess, B., Marshall, K., Choo, V., Andrzejewski, K. & Dumont, E. (2022). *Delivering the Belt and Road: Decoding the supply of and demand for Chinese overseas development projects*. Williamsburg, VA: AidData at William & Mary. https://docs.aiddata.org/ad4/pdfs/Delivering_the_Belt_and_Road_Decoding_the_supply_of_and_demand_for_Chinese_overseas_development_projects.pdf
- Horn, S., Parks, B. C., Reinhart, C. M. & Trebesch, C. (2023). *China as an International Lender of Last Resort*. AidData Working Paper 124. https://docs.aiddata.org/ad4/pdfs/WPS124_China_as_an_International_Lender_of_Last_Resort.pdf
- Imaduddin, A. H. & Askar, M. W. (2024). *Prabowo-Gibran's Economic Recovery Roadmap: Navigating the 10 Fiscal Pitfalls from Joko Widodo's Legacy*. Jakarta: Center of Economic and Law Studies. <https://celios.co.id/wp-content/uploads/2024/09/Navigating-10-Fiscal-Pitfalls-From-Joko-Widodo-Legacy.pdf>
- Jarso, G. (2017). Changes and continuity in the conceptualization of development: A review. *International Journal of Peace and Development Studies*, 8(5). <https://doi.org/10.5897/ijpds2016.0277>
- Jones, L. & Hameiri, S. (2020). Debunking the Myth of 'Debt-trap Diplomacy': How Recipient Countries Shape China's Belt and Road Initiative. Chatham House. https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/2020-08-25_debunking-myth-debt-trap-diplomacy-jones-hameiri.pdf
- Jones, L. & Jinghan Zeng. (2019). Understanding China's 'Belt and Road Initiative': beyond 'grand strategy' to a state transformation analysis. *Third World Quarterly*. DOI: 10.1080/01436597.2018.1559046

- Khan, M. W. (2025). Tazkirul Quran. Quran.com. <http://quran.com/id>
- Kilama, E. G. (2015). The influence of China and emerging donors' aid allocation: A recipient perspective. *China Economic Review*, 38. <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2015.11.010>
- Kleven, A. (2019, 6 May). Belt and Road: colonialism with Chinese characteristics. *The Interpreter*. Lowy Institute. <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/belt-road-colonialism-chinese-characteristics>
- Kumparan (2025, 26 Mei). Ini Daftar Lengkap 12 Kesepakatan Antara RI-China. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/ini-daftar-lengkap-12-kesepakatan-antara-ri-china-258uSyDdRTT/full>
- Lai, K. P. Y, Lin, S. & Sidaway, J. D. (2020). Financing the Belt and Road Initiative (BRI): research agendas beyond the “debt-trap” discourse. *Eurasian Geography and Economics*. DOI: 10.1080/15387216.2020.1726787
- Lalisang, Y. (2013). Kunjungan Presiden Xi Jinping ke Indonesia dari Perspektif Media di Indonesia dan Tiongkok: Suatu Kajian Pendahuluan. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 15(2). 216–236. DOI: 10.7454/global.v15i2.30
- Liu Qi. (2020). *China's One Belt One Road Initiative—A Debt Trap?* University of Denver Graduate Thesis. <https://digitalcommons.du.edu/etd/1803>
- Lippolis, N. & Verhoeven, H. (2022). Politics by Default: China and the Global Governance of African Debt. *Survival*, 64(3), 153–178. <https://doi.org/10.1080/00396338.2022.2078054>
- Ma, J. & Chang, C. P. (2023). The Role of Green Finance in Green Innovation: Global Perspective from 75 Developing Countries. *Emerging Markets Finance and Trade*, 59(10), 3109–3128. <https://doi.org/10.1080/1540496X.2023.2210720>
- Malik, A., Parks, B., Russell, B., Lin, J., Walsh, K., Solomon, K., Zhang, S., Elston, T., & Goodman, S. (2021). *Banking on the Belt and Road: Insights from a new global dataset of 13,427 Chinese development projects*. Williamsburg, VA: AidData at William & Mary.

https://docs.aiddata.org/ad4/pdfs/Banking_on_the_Belt_and_Road_I_sights_from_a_new_global_dataset_of_13427_Chinese_development_projects.pdf

- Martin, J. P. (2006). Development and rights revisited: lessons from Africa. *Sur. Revista Internacional De Direitos Humanos*, 3(4). <https://doi.org/10.1590/s1806-64452006000100006>
- Matthews, S. J. (2010). Postdevelopment Theory. In *Oxford Research Encyclopedia of International Studies*. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.39>
- Mbuya, J.-M. M., & Mphahlele, A. (2021). Assessing the role of China in Africa's infrastructure development and its impact on the African continent. *The Business & Management Review*, 12(2), 160–167. <https://doi.org/10.24052/bmr/v12nu02/art-12>
- McCann, D. P. (2022). What Does It Mean to Dialogue with China? In S. Rothlin, D. McCann & M. Thompson (eds), *Dialogue with China: Opportunities and Risks*. 1–15. Singapore: World Scientific.
- Media Wahyudi Askar, M. W., Adhinegara, B. Y., Muhammad, G. D., Fikri, B., Darmawan, J. & Saleh, M. (2025). *Rapor 100 Hari Prabowo-Gibran: Evaluasi Kinerja Kabinet Merah Putih dan Program Ekonomi, Energi, Lingkungan Hidup serta Penegakan Hukum*. Jakarta: Center of Economic and Law Studies. <https://celios.co.id/wp-content/uploads/2025/01/Rapor-100-Hari-Prabowo-Gibran-Fx-2025.pdf>
- Mensah, J. (2019). Sustainable development: Meaning, history, principles, pillars, and implications for human action: Literature review. *Cogent Social Sciences*, 5(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2019.1653531>
- Mlambo, C. (2022). China in Africa: An Examination of the Impact of China's Loans on Growth in Selected African States. *Economies*, 10(7). <https://doi.org/10.3390/economies10070154>
- Monyae, D. & Chapotera, K. (2023). China's Africa Debt Trap Question: Ethiopia and Kenya Infrastructure Case Studies. In Bhaso Ndzendze & David Monyae (eds). *Perspectives on Africa-China Infrastructural and Industrial Cooperation:*

Empirical Findings and Conceptual Implications. 209–229. Cham: Springer

- Moramudali, U. & Panduwawala, T. (2024). The political economy of Hambantota port: unveiling the realities of debt trap diplomacy and BRI vision. *Asian Journal of Political Science*, 32(3), 380–399, DOI: 10.1080/02185377.2024.2424758
- Morgan Stanley. (2025, 28 May). 2025 Midyear Economic Outlook: A Widespread Deceleration. <https://www.morganstanley.com/insights/articles/economic-outlook-midyear-2025>
- Mosse, D. (2013). The Anthropology of International Development. *Annual Review of Anthropology*, 42(1), 227–246. <https://doi.org/10.1146/annurev-anthro-092412-155553>
- Nath, S. & Raganata, G. (2020). An Assessment of Economic and Financial Impacts of Jakarta-Bandung High-Speed Railway Project. *Journal of Business and Political Economy*, 2(1), 45–55. DOI: <https://doi.org/10.46851/27>
- Nedopil, C. (2025). China Belt and Road Initiative (BRI) Investment Report 2024. Griffith Asia Institute and Green Finance & Development Center. February. https://www.griffith.edu.au/data/assets/pdf_file/0017/2093102/China-Belt-and-Road-Initiative-BRI-Investment-Report-2024.pdf
- Negara, S. D. & Suryadinata, L. (2018). *Indonesia and China's Belt and Road Initiatives: Perspectives, Issues and Prospects*. Singapore: ISEAS. Negara, S. D. & Suryadinata, L. (2019). The Flying Geese and China's BRI in Indonesia. *The Singapore Economic Review*. DOI: 10.1142/S0217590819410042
- Nicola, A. (2023). *Penilaian Risiko Korupsi Infrastruktur di Indonesia*. Transparency International Indonesia. <https://ti.or.id/wp-content/uploads/2023/12/Laporan-Akhir-ICRAT-INA.pdf>
- Olatunji, F. O. & Bature, A. I. (2019). The Inadequacy of Post Development Theory to the Discourse of Development and Social Order in the Global South. *Social Evolution & History*, 18(2), 229–243. <https://doi.org/10.30884/seh/2019.02.12>

- Parks, B. C., Malik, A. A., Escobar, B., Sheng Zhang, Fedorochko, R., Solomon, K., Fei Wang, Vlasto, L., Walsh, K. & Goodman, S. (2023). *Belt and Road Reboot: Beijing's Bid to De-Risk Its Global Infrastructure Initiative*. Williamsburg, VA: AidData at William & Mary. https://docs.aiddata.org/reports/belt-and-road-reboot/Belt_and_Road_Reboot_Full_Report.pdf
- Peterson, D. (2023). China's Power Play in Indonesia: Infrastructure Investment and Territorial Incursions. *Moussons*, 41, 223–247. <https://doi.org/10.4000/moussons.10736>
- Pratiwi, F. I. (2020). China Belt and Road Initiatives (BRI) in Indonesia's Socio-Economic Security Challenges: A Policy Recommendation. In *Sorotan Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Mata Akademisi Muda Indonesia*. Jakarta. <https://www.researchgate.net/publication/343547889>
- Primantoro, A. Y. (2023, 16 Juni). Mengukur Potensi Jebakan Utang. *Kompas*. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/06/15/mengukur-potensi-jebakan-utang>
- Pulungan, A. M. & Listiyanto, E. (2021). *Debt sustainability and debt management in Indonesia – lessons from China*. ECIDC Project Paper No. 2. November. https://unctad.org/system/files/official_document/BRI-Project_RP18_en.pdf
- Rachman, J. (2024, 11 November). Did Prabowo just yield to China in the North Natuna Sea? *Asia Times*. <https://asiatimes.com/2024/11/did-prabowo-just-yield-to-china-in-the-north-natuna-sea>
- Rakhmat, M. Z. (2022). *The Political Economy of China-Indonesia Relations in 2022*. Jakarta: Institute for Development of Economics and Finance.
- Rakhmat, M. Z. & Purnama, Y. (2023). *China's Belt and Road Initiative in Indonesia - How to Avoid Low Investment Quality and Debt Traps?* Jakarta: Center of Economic and Law Studies. https://celios.co.id/wpcontent/uploads/2024/12/CELIOS_Deb_Trap_China_in_Indonesia_report_ENGLISH_67555af181.pdf
- Rakhmat, M.Z., Purnama, Y. & Adhinegara, B. Y. (2024). *China Indonesia Survey 2024: Insight into Indonesian Public*

Perceptions of China. Jakarta: Center of Economic and Law Studies. https://celios.co.id/wp-content/uploads/2024/11/CELIOS_CHINA_INDONESIA_SURVEY_2024_5b9e743c3.pdf

- Rakhmat, M. Z., Purnama, Y. & Yudhistira, B. (2024). *Redefining China's "Debt-Trap": An Indonesian Perspective*. Jakarta: Center of Economic and Law Studies. https://celios.co.id/wp-content/uploads/2024/11/CELIOS_Redefining_Debt_Trap_2024_835ad4eb3c.pdf
- Ramadhan, A. (2020, 12 Oktober). China Sangkal Memberikan "Jebakan Utang" pada Sri Lanka. *Kompas*. <https://www.kompas.id/baca/internasional/2020/10/12/china-sangkal-memberikan-jebakan-utang-pada-sri-lanka>
- Rithmire, M. & Li, Y. (2019). Chinese Infrastructure Investments in Sri Lanka: A Pearl or a Teardrop on the Belt and Road? <https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=55410>
- Rivai, A. (2024, 14 Oktober). Menangkap peluang kerja sama saling menguntungkan Indonesia-Tiongkok. *Antara*. <https://www.antaranews.com/berita/4396158/menangkap-peluang-kerja-sama-saling-menguntungkan-indonesia-tiongkok>
- Sally, R. (2013, 23 January). What can South Asia learn from EastAsia? *East Asia Forum*. <https://eastasiaforum.org/2013/01/23/what-can-south-asia-learn-from-east-asia/>
- Saragih, S. (2023, 13 November). Karena China, Banyak Negara Terhindar Gagal Bayar Utang. *Kompas*. <https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/11/10/karena-china-banyak-negara-terhindar-gagal-bayar-utang>
- Sasmitha, R. P. (2023, 13 November). Jaminan APBN dan jebakan utang kereta cepat. *TEMPO*. <https://www.tempo.co/kolom/jebakan-utang-proyek-kereta-cepat-103271>
- Shaid, N. J. (2025, 5 Juni). 11 Program Prioritas Prabowo Serap Rp 446 Triliun dari APBN, Berikut Rinciannya. *Kompas.com*. <https://money.kompas.com/read/2025/06/05/124921426/11-program-prioritas-prabowo-serap-rp-446-triliun-dari-apbn-berikut-rinciannya>

- Shofa, J. N. (2023, 15 June). Indonesia's Growing Reliance on Chinese Investments Could Backfire. *The Jakarta Globe*. <https://jakartaglobe.id/business/indonesias-growing-reliance-on-chinese-investments-could-backfire>
- Singh, A. (2020). The myth of 'debt-trap diplomacy' and realities of Chinese development finance. *Third World Quarterly*. DOI: 10.1080/01436597.2020.1807318
- Skidmore, D. (2021). Searching for a "China model" along the Belt and Road. *Asian Politics & Policy*, 13(3), 326–348. <https://doi.org/10.1111/aspp.12589>
- Soong, J.-J. (2018). China's One Belt and One Road Initiative Meets ASEAN Economic Community: Propelling and Deepening Regional Economic Integration? *Chinese Economy*, 51(4), 291–297. <https://doi.org/10.1080/10971475.2018.1457335>
- Stewart, R. (2021). Turning 'evidence for development' on its head: A view from Africa. *Research for All*, 5(1), 174–187. <https://doi.org/10.14324/rfa.05.1.13>
- Strangio, S. (2014, 12 November). Did Indonesia Just Capitulate to China on the South China Sea? *The Diplomat*. <https://thediplomat.com/2024/11/did-indonesia-just-capitulate-to-china-on-the-south-china-sea/>
- Sumarwan, A. (2024, 12 November). Cina tetap jadi mitra strategis kebijakan ekonomi luar negeri Indonesia. *The Conversation*. <https://theconversation.com/cina-tetap-jadi-mitra-strategis-kebijakan-ekonomi-luar-negeri-indonesia-241907>
- Tao, A. (2023, 2 August). Beyond the Narrative of China's Debt Trap Diplomacy. *e-International Relations*. <https://www.e-ir.info/2023/08/02/beyond-the-narrative-of-chinas-debt-trap-diplomacy/>
- Tempo. (2023a, 22 Agustus). Bahaya jebakan perangkap utang. <https://www.tempo.co/kolom/risiko-besar-utang-pemerintah-821727>
- Tempo. (2023b, 12 November). Jebakan utang kereta cepat Jakarta-Surabaya. <https://www.tempo.co/kolom/proyek-kereta-cepat-jakarta-surabaya-103224>

- Tetteh, E. (2021). Foreign aid, China's aid, and Africa's Development: Interrogating the Dynamics. *Journal of Social and Political Sciences*, 4(2), 239–248.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3857398
- Thovoethin, P.-S. & Ewalefoh, J. O. (2019). Over 50 years of African statehood: Locating a new narrative for African development challenges. *Africa's Public Service Delivery and Performance Review*, 7(1). <https://doi.org/10.4102/apsdpr.v7i1.253>
- Wibisono, Y. (2023, 23 September). Lingkaran jebakan utang negara. *TEMPO*. <https://www.tempo.co/kolom/beban-utang-negara-terus-meningkat-pertumbuhan-ekonomi-melambat-833159>
- Wuryandari, G. (2018). The Prospects of Indonesia–China Relations. In L. C. Sinaga (ed.), *Six Decades of Indonesia-China Relations: An Indonesian Perspective*. 79–93. Singapore: Springer.
- Xiao Hongjun, Junjie Cheng & Wang Xin. (2018). Does the Belt and Road Initiative Promote Sustainable Development? Evidence from Countries along the Belt and Road. *Sustainability*, 10(12), 4370. <https://doi.org/10.3390/su10124370>
- Xiaodong Lu & Ronglin Li. (2010). South-South cooperation: Is there a foundation in trade? *Journal of Chinese Economic and Foreign Trade Studies*, 3(3), 221–234.
<https://doi.org/10.1108/17544401011084307>
- Yanwardhana, E. (2024, 11 November). Xi Jinping Ungkap China Siap Bantu Danai Makan Bergizi Gratis Prabowo. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20241111162719-4-587337/xi-jinping-ungkap-china-siap-bantu-danai-makan-bergizi-gratis-prabowo>
- Yee, W. Y. (2023). Ten Years On, How is the Belt and Road Initiative Faring in Indonesia? *China Brief*, 23(4), 17–21.
<https://jamestown.org/wp-content/uploads/2023/03/Read-the-3.3-Issue-in-PDF.pdf>
- Yeung, H. & Huber, J. (2024). Has China's belt and road initiative positively impacted the economic complexity of host countries? Empirical evidence. *Structural Change and Economic Dynamics*, 69. 246–258. <https://doi.org/10.1016/j.strueco.2023.12.012>

- Yichen Hao. (2021). Is China's Investment A Debt Trap? A Comparative Research Based on the Investment in the United States, Europe, and China. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 203, 2604-2610.
DOI:10.2991/assehr.k.211209.424
- Yuliantoro, N. R. (2020). The 2019 Presidential Election and the BRI's Prospects in Indonesia. *China Quarterly of International Strategic Studies*, 6(1), 79–102.
<https://doi.org/10.1142/S2377740020500050>
- Yuliantoro, N. R. (2024). Menelusuri *Belt and Road Initiative*: Dukungan Keuangan Tiongkok dan Hubungan Indonesia-Tiongkok. Dalam Hayati Nufus, Lidya C. Sinaga & Xue Song (eds), *Refleksi Satu Dekade Belt and Road Initiative: Peluang dan Tantangan Kerja Sama Indonesia-Tiongkok*. 113–134. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Yuniar, R. W. (2023, 24 October). Indonesia drove Chinese ship out of disputed waters. Is Beijing 'testing' Jakarta's resolve? *South China Morning Post*. <https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3283688/indonesia-drove-chinese-ship-out-disputed-waters-beijing-testing-jakartas-resolve>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nur Rachmat Yuliantoro
 Tempat dan tanggal lahir : Yogyakarta, 24 Juli 1974
 NIP : 197407241999031003
 Pangkat dan Golongan : Pembina Tingkat I, IV/b
 Alamat kantor : Departemen Ilmu Hubungan
 Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan
 Politik Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio
 Yustisia 1, Bulaksumur, Yogyakarta 55281

Keluarga

Istri : Tutuyaningsih
 Anak : 1. Muhammad Luthfi Abdul Aziz
 2. Aisha Hafiza Rahma

Riwayat Pendidikan

2011 : PhD, Asian Studies, Flinders University, South Australia
 2004 : MA(IR), School of International and Political Studies, the
 Flinders University of South Australia
 1997 : Sarjana Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional,
 FISIPOL UGM

Riwayat Pekerjaan

1999 s.d. sekarang : Dosen Jurusan/Departemen Ilmu Hubungan
 Internasional FISIPOL UGM
 2017 s.d. sekarang : Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional
 FISIPOL UGM
 2016 s.d. 2017 : Ketua Program Studi S1 Ilmu Hubungan
 Internasional FISIPOL UGM
 2012 s.d. 2015 : Sekretaris Program Studi S1 Ilmu Hubungan
 Internasional FISIPOL UGM
 1997 s.d. 1999 : Asisten Peneliti Jurusan Ilmu Hubungan
 Internasional FISIPOL UGM

Publikasi

1. **Yuliantoro, N.R.** (2025). Converging the Belt and Road Initiative and the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific: A View from Indonesia. Singapore: World Scientific. (forthcoming)
2. **Yuliantoro, N.R.** (2025). China's Role in International Conflicts Mediation and Its Implications for International Relations. *Nation State*, 8(1). 1–19. <https://doi.org/10.24076/nsjis.v8i1.2051>
3. **Yuliantoro, N.R.** (2025). Pengantar: Mempelajari Cina, Upaya yang Diperlukan di Abad ke-21. *Belajar dari Cina: Kumpulan Esai*, disunting oleh N.R. Yuliantoro. ix-xx. Yogyakarta: Samudera Biru.
4. **Yuliantoro, N.R.** (2024). Menelusuri *Belt and Road Initiative*: Dukungan Keuangan Tiongkok dan Hubungan Indonesia-Tiongkok. *Refleksi Satu Dekade Belt and Road Initiative: Peluang dan Tantangan Kerja Sama Indonesia-Tiongkok*, disunting oleh H. Nufus, L.C. Sinaga & Xue Song. 113–133. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
5. **Yuliantoro, N.R.** (2024). Writing about China: Learning experiences from a university-level course in Indonesia. *The 2024 China-Indonesia People-to-People Exchanges Development International Conference. Proceedings (Part 1)*. Fuqing: Fujian Polytechnic Normal University. 91–98.
6. **Yuliantoro, N.R.** (2024). China's Global Security Initiative: Its Objective and Implications for Southeast Asia. *Global Strategis*, 18(2). 285–306. <https://doi.org/10.20473/jgs.18.2.2024.285-306>
7. **Yuliantoro, N.R.** & Bromokusumo, L.P. (2023). The 2022 Ukraine Crisis: What It Means for Sino-Russia Relations. *Intermestic: Journal for International Studies*, 8(1). 333–355. <http://dx.doi.org/10.24198/intermestic.v8n1.16>
8. **Yuliantoro, N.R.** (2023, 30 October). Indonesia walks an APEC tightrope. *360info.org*. <https://360info.org/indonesia-walks-an-apec-tightrope/>
9. **Yuliantoro, N.R.** (2023, 6 July). Unraveling the Belt and Road puzzle in Indonesia. *The Jakarta Post*. <https://www.thejakartapost.com/opinion/2023/07/06/unravelling-the-belt-and-road-puzzle-in-indonesia.html>

10. **Yuliantoro, N.R.** (2022). The Politics of Vaccine Diplomacy and Sino-Indonesian Relations. *Global Strategis*, 16(1): 127–146. <https://doi.org/10.20473/jgs.16.1.2022.127-146>
11. **Yuliantoro, N.R.** (2022). “*Indispensable Nation*” dan Peran Amerika Serikat dalam Krisis di Ukraina. *Konflik Rusia-Ukraina: Tinjauan dari Berbagai Perspektif*, disunting oleh R. Satria, I. Rachmawati & S.G. Prakoso. 163–184. Jakarta: AIHII Press.
12. **Yuliantoro, N.R.** (2021, 15 September). 11 September, 20 Tahun Kemudian. *Kompas*. <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/09/15/11-september-20-tahun-kemudian>
13. **Yuliantoro, N.R.** (2021). Diplomasi Masker: Cina sebagai Kekuatan Besar yang Bertanggung Jawab? *The Global South: Refleksi Dan Visi Studi Hubungan Internasional*, disunting oleh L. Hakim, M. Sugiono & M. Mas’oed. 189–204. Yogyakarta: UGM Press.
14. **Yuliantoro, N.R.** (2021). Connecting the Master Plan on ASEAN Connectivity 2025 and the Belt and Road Initiative: How to Promote People-To-People Ties. *ASEAN-China Cooperation on Regional Connectivity and Sustainability*, edited by Guo Yanjun & Yang Yue. 59–72. Singapore: World Scientific.
15. **Yuliantoro, N.R.** (2021). China dan Kawasan Indo-Pasifik: Reaksi, Kebijakan, dan Tantangan Keamanan. *Tinjauan Multiperspektif Kawasan Indo-Pasifik: Peluang dan Tantangan*, disunting oleh L.M. Fathun & R. Isnanti. 125–148. Yogyakarta: Graha Ilmu.
16. **Yuliantoro, N.R.** (2020). The 2019 Presidential Election and the BRI’s Prospects in Indonesia. *China Quarterly of International Strategic Studies*, 6(1). 1–24. <https://doi.org/10.1142/S2377740020500050>
17. **Yuliantoro, N.R.** (2020). *Menuju Kekuatan Utama Dunia: Sekilas Politik Luar Negeri Cina*, Edisi Kedua. Yogyakarta: UGM Press.
18. **Yuliantoro, N.R.** (2019). The Belt and Road Initiative: ‘Kerja Sama Selatan-Selatan dengan Karakteristik Cina’ untuk Membangun Citra Internasional yang Positif. *Kebangkitan “The*

Global South”: Strategi, Implementasi dan Implikasinya bagi Tata Kelola Ekonomi Politik Global, disunting oleh P.S. Winanti & R.A. Alvian. 177–195. Yogyakarta: Graha Ilmu.

19. **Yuliantoro, N.R.** (2019). The Belt and Road Initiative and China–ASEAN Relations: An Indonesian Perspective. *The Belt and Road Initiative: ASEAN Countries’ Perspectives*, edited by Yang Yue & Fujian Li. 81–101. Singapore: World Scientific.
20. **Yuliantoro, N.R.** & Dinarto, D. (2019). Between Revisionist and Status Quo: The Case of China’s Leadership in the AIIB. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(2): 169–177.
<https://doi.org/10.18196/hi.72131>
21. **Yuliantoro, N.R.** & Akbar, H. (2018). Pendahuluan: Mengapa menghadapi Kebangkitan Cina? *Menghadapi Kebangkitan Cina*, disunting oleh N.R. Yuliantoro & H. Akbar. 1–20. Yogyakarta: Graha Ilmu.
22. Akbar, H. & **Yuliantoro, N.R.** (2018). Penutup: Menghadapi Kebangkitan Cina dan Kepentingan Nasional. *Menghadapi Kebangkitan Cina*, disunting oleh N.R. Yuliantoro & H. Akbar. 287–304. Yogyakarta: Graha Ilmu.
23. **Yuliantoro, N.R.** (2018, 7 Agustus). Kunjungan Pompeo dan Relasi AS-Indonesia. *Kompas*.
<https://www.kompas.id/baca/opini/2018/08/07/kunjungan-pompeo-dan-relasi-as-indonesia>
24. **Yuliantoro, N.R.** (2018, 13 Juni). Trump dan Kim: Siapa yang ”Menang”? *Kompas*.
<https://www.kompas.id/baca/opini/2018/06/13/trump-dan-kim-siapa-yang-menang>
25. **Yuliantoro, N.R.** (2018, 2 Mei). Membaca Pertemuan Kim dan Moon. *Kompas*.
<https://www.kompas.id/baca/opini/2018/05/02/membaca-pertemuan-kim-dan-moon>
26. **Yuliantoro, N.R.** (2017). *Menjadi Kaya itu Mulia! Reformasi Ekonomi dan Penjelasan Kultural-Struktural Korupsi di Cina*. Yogyakarta: Institute of International Studies.
27. **Yuliantoro, N.R.** (2017, 3 November). Kongres ke-19 Partai Komunis: Melihat Masa Depan Cina. *The Conversation*.

<https://theconversation.com/kongres-ke-19-partai-komunis-melihat-masa-depan-cina-86237>

28. **Yuliantoro, N.R.** (2016, 11 November). Amerika Telah Memilih, Kita Semua akan Hidup dengan Konsekuensinya. *DetikNews*. <https://news.detik.com/kolom/d-3342871/amerika-telah-memilih-kita-semua-akan-hidup-dengan-konsekuensinya>.
29. **Yuliantoro, N.R.,** Prabandari, A. & Dafri. (2016). Pemilihan Presiden Tahun 2016 dan Politik Luar Negeri Amerika Serikat. *Jurnal Hubungan Internasional*, 5(2). 193–209. <https://doi.org/10.18196/hi.5297>
30. **Yuliantoro, N.R.** (2014). Managing Differences and Building Trust: Challenges to U.S.- China Relations. *Indonesian Journal of International Studies*, 1(2). 123–132.
31. **Yuliantoro, N.R.** (2014). “Promoting Mutual Interests and Cooperation”: The Bandung Declaration and Fighting against Corruption in Asia and Africa. *Bandung Conference and Beyond: Rethinking International Order, Identity, Security, and Justice in a Post-Western World*. Prosiding konferensi. 472–483. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional UGM.
32. **Yuliantoro, N.R.** (2012). Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) sebagai Bentuk Kerja Sama Selatan-Selatan. *Multiversa*, 2(2). 113–127.
33. **Yuliantoro, N.R.** (2005). Hegemoni Amerika Pasca 9/11: Menuju Sebuah ‘Imperium Amerika Baru’? *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 9(1). 91–112